



LAPORAN PENELITIAN
DIPA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2005

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENENTUKAN
PEMIMPIN PEMERINTAH DAERAH DAN
DEMOKRATISASI DI ARAS LOKAL**

Oleh:

**Dra. Siti Aminah, MA.
Drs. Sutrisno, MS.
Sri Endah Kinasih, S.Sos., M.Si.**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Dibiayai oleh Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2005,
Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga
Nomor 4683/J03/PP/2005
Tanggal 4 Juli 2005
Nomor Urut : 52

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

November, 2005

- LEADERSHIP
- LOCAL GOVERNMENT



LAPORAN PENELITIAN
DIPA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2005

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENENTUKAN PEMIMPIN PEMERINTAH DAERAH DAN DEMOKRATISASI DI ARAS LOKAL

KKB
KK-2
LP 118/08
Ami
P

Oleh:

Dra. Siti Aminah, MA.
Drs. Sutrisno, MS.
Sri Endah Kinasih, S.Sos., M.Si.

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai oleh Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2005,
Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga
Nomor 4683/J03/PP/2005
Tanggal 4 Juli 2005
Nomor Urut : 52

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA

November, 2005





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
IR. PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5962066
 E-mail : infolemlit@unair.ac.id - http://lppm.unair.ac.id

IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

1. Judul Penelitian : **Partisipasi Masyarakat Dalam Menentukan Pemimpin Pemerintah Daerah dan Demokratisasi Di Aras Lokal**

a. Macam Penelitian : Fundamental, Terapan, Pengembangan, Institusional

b. Katagori Penelitian : I II III IV

2. Kepala Proyek Penelitian

a. Nama Lengkap dan Gelar : **Dra. Siti Aminah, MA.**

b. Jenis Kelamin : **Perempuan**

c. Pangkat/Golongan dan NIP: **Penata Tk. I. (Gol. III/d) 131 836 624**

d. Jabatan Sekarang : **Lektor**

e. Fakultas/Puslit/Jurusan : **Fakultas ISIP**

f. Univ./Inst. /Akademi : **Universitas Airlangga**

g. Bidang Ilmu Yang Diteliti : **Politik**

3. Jumlah Tim Peneliti : **3 (tiga) orang**

4. Lokasi Penelitian : **Surabaya**

5. Kerjasama dengan Instansi Lain

a. Nama Instansi : **-**

b. A l a m a t : **-**

6. Jangka Waktu Penelitian : **5 (lima) bulan**

7. Biaya Yang Diperlukan : **5.750.000,00**

8. Seminar Hasil Penelitian

a. Dilaksanakan Tanggal :

b. Hasil Penelitian : Baik Sekali Baik Sedang Kurang

Surabaya, Nopember 2005



Mengetahui/Mengesahkan :
 a.n. Rektor

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Prof. Dr. H. Sarmanu, MS.
 NIP. 130 701 125

RINGKASAN

A. Judul: PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENENTUKAN PEMIMPIN PEMERINTAH DAERAH DAN DEMOKRATISASI DI ARAS LOKAL

Peneliti: Siti Aminah, Sutrisno, Sri Endah Kinasih
Tahun 2005, 55 halaman

B. 1. Permasalahan Penelitian

- i. Bagaimana partisipasi politik warga kota Surabaya dalam Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung ? Aspek yang diteliti dalam hal ini adalah sejauh mana tingkat otonomi warga dalam menentukan sikapnya memilih pemimpinnya. Apakah karena pengaruh mobilisasi partai politik semata, faktor primordialisme atau calon putra daerah atau karena unsure rasionalitas dan hati nurani ?
- ii. Sampai sejauh mana kualitas partisipasi menentukan kualitas demokratisasi di aras lokal ? Yang diteliti adalah bagaimana peranan dari unsur emosi, kultur paternalisme, sikap rasionalitas, kesadaran politik, hubungan pertemanan menentukan pilihan politiknya?

B. 2. Tujuan Penelitian

- i. Memberikan gambaran secara empirik tentang partisipasi politik warga kota Surabaya dalam Pilkada.
- ii. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik warga dalam menentukan pejabat pemerintah daerahnya.

B. 3. Metode Penelitian

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, wawancara tak berstruktur dan studi pustaka. Analisis data dilakukan peneliti sejak turun ke lapangan. Artinya, analisis tidak hanya dilakukan pada saat data dari wawancara sudah terkumpul lengkap, tetapi sejak proses penelitian ini berlangsung sampai sesudah pengumpulan data berakhir. Lokasi penelitian dipilih secara purposive berdasarkan tiga karakteristik: (1) Aspek heterogenitas budaya atau pluralitas etnik; (2) Intensitas dan potensi konflik/kerusuhan social yang terjadi; (3) Kesenjangan ekonomi dan social yang ada di masyarakat.

B.4. Hasil dan Kesimpulan

Terdapat dua realitas yang bersebrangan dengan proses politik Pilkada yang sudah terjadi beberapa waktu lalu, dimana di satu sisi ada tuntutan untuk memberdayakan politik rakyat seperti yang dirumuskan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 ternyata UU tersebut sekadar sebagai payung hukum pemilihan secara langsung,

karena hampir semua proses Pilkada banyak ditentukan oleh partai politik, seperti dalam pengajuan calon. Partai politik begitu kuat mendominasi proses seleksi calon kepala daerah. Dengan realitas demikian, persoalannya adalah apakah hal ini tidak mengurangi arti demokratisasi di aras lokal. Demokratisasi tidak punya banyak arti jika tidak ada penguatan partisipasi rakyat dalam realitasnya. Karena bagaimanapun demokratisasi pemilihan kepala daerah memerlukan legitimasi politik yang itu adalah rakyat, tanpa legitimasi yang berfungsi sebagai salah satu arena utama konsolidasi demokrasi, maka tidak ada konsolidasi demokratisasi di aras lokal.

Kesimpulan:

- a. Partisipasi warga kota Surabaya dalam Pilkada langsung menunjukkan adanya otonomi yang besar karena mereka sebagian bisa menentukan pilihan politiknya berdasar preferensi dan aspirasi politiknya. Meski ada juga yang memilih karena sudah dipengaruhi oleh pihak lain, hal ini dilakukan masyarakat sejauh dianggap sesuai dengan preferensi dan aspirasi politiknya.
- b. Peran partai politik dalam mobilisasi warga kurang menunjukkan adanya keterkaitan langsung, kecuali dari tampilan partai dalam memajukan calon yang dianggap memadai. Peluang untuk calon independen dibuka kembali untuk meminimalisasi adanya praktik politik uang. Mobilisasi cenderung datangnya lebih besar dari warga sendiri yang mempengaruhi pihak lain untuk memilih calon yang dianggap layak untuk menjalankan roda tata pemerintahan kota Surabaya.
- c. Unsur primordialisme sedikit banyak berpengaruh tetapi bukan sebagai faktor yang menentukan. Unsur rasionalitas lebih mengedepan untuk menjadi pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihannya. Pola patron client masih terlihat mewarnai pilihan masyarakat dalam Pilkada.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Airlangga

Dibiayai oleh : DIPA UNIVERSITAS AIRLANGGA

Nomor S.K. Rektor : 4683/JO3/PP/2005

Tanggal : 4 Juli 2005

Kata kunci = Pemimpin ; Pemerintah daerah ; demokratisasi

SUMMARY

A. Title: PEOPLE PARTICIPATION IN DETERMINE THE LOCAL LEADER AND DEMOCRATIZATION IN LOCAL LEVEL

Researcher: Siti Aminah, Sutrisno, Sri Endah Kinasih.
Year 2005, 55 pages

B. 1. Problems of Research.

- i. How do citizen political participation in Surabaya in this case in the Election of regional leader (Pilkada directly) ? What accurate aspects influence or determine in this case how far the autonomous, how far the participation society in determining the attitude of choosing their leader. How if the factor such as political party mobilization, primordialism and public figure at local area influence their choice ?
- ii. How far the quality of participation determine the quality of democratization at local level ? The problem is checked out how far the role of emotion element, paternalism culture, attitude of rationality, awareness of politics, relation take choice its politics

B. 2. Objectives

- i. Giving picture empirically concerning political participation [of] towny of Surabaya in Pilkada.
- ii. Identifying factors influencing political participation o] citizen in determining local leader.

B. 3. Method Research.

Technique data collecting in this research use questioner, structure interview. Data analysis conducted by researcher since going down to field. Mean, analysis not only conducted at the all time of data of interview have been gathered completed, but since this research process take place until after data collecting end. Research location selected by purposive.

B.4. Result and Conclusion.

There are two reality which is bersebrangan with political process [of] Pilkada which have happened some times then, where in one side there is demand from people to

participate directly and that is formulated in The Law No. 32/2004 in the reality the law merely as the umbrella punish election directly, because most of all processes of Pilkada determined many by political parties, like in proffering of candidate. Political party so strength predominate process select regional leader candidate. With reality that way, problem of is do this matter [do] not lessen the meaning of democratization [in] local level. Democratization have no many meanings if [there] no reinforcement of people participation in his reality. Because however democratization election of regional leader need that political legitimasi is people, without legitimasi the functioningness as one of [the] especial arena [of] democracy consolidation, hence [there] no democratization consolidation [in] local level.

Conclusion:

- a. Participation public in Surabaya especially on Pilkada show off the existence of big autonomy because they are some of can take choice the politics of based on political aspiration and preferency them. Even there is also choosing because have influenced by other party, this matter was conducted by society was as far as assumed as according to political aspiration and preferency of them.
- b. Role of political party in citizen mobilization less show the existence of direct related/relevant, except from party appearance in moving forward adequate assumed candidate. Opportunity for reopened independent candidate for minimalice of the existence of money politics. Mobilisation is tend to the coming of bigger than citizen alone influencing other party to choose competent assumed candidate to run wheel arrange municipal administration in Surabaya.
- c. Element of Primordialism more or less having an effect on the Pilkada, but not as a determine factors. Element of rasionality more important to become consideration of society in taking their choice. The pattern of patron client relationship still seen to colour of choices society in the Pilkada.

Faculty of Social and Political Sciences, University of Airlangga

Financed By : DIPA UNIVERSITY of AIRLANGGA

Number of Rector Letter : 4683/JO3/PP/2005.

Date : 4th July 2005.

KATA PENGANTAR

Penelitian ini diawali dari keingintahuan peneliti tentang proses dan implikasi dari pemilihan kepala daerah secara langsung yang merupakan konsekuensi dari revisi atas UU Pemerintahan daerah sebelumnya UU No. 22 tahun 1999. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang berdasar UU No.32 tahun 2004 ini dapat menjadi tengara bagi awal dari proses demokratisasi di aras lokal. Penelitian ini melihat bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam Pilkada langsung, yang mau tak mau harus diakui sebagai aktualisasi hak-hak politik rakyat untuk membangun daerahnya sendiri di era reformasi.

Penelitian ini pendanaannya didukung sepenuhnya oleh dana DIPA Universitas Airlangga. Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih. Ucapan terima kasih yang tulus kami tujukan kepada ketua Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat Universitas Airlangga dan tim penilai proposal karena sudah memfasilitasi secara penuh penelitian ini hingga selesai. Ucapan serupa kami tujukan kepada mahasiswa FISIP Univ. Airlangga yang sudah banyak membantu saat pengumpulan data. Kepada pihak Lembaga penelitian yang membantu memfasilitasi administrasi penelitian ini kami sampaikan banyak terima kasih. Kepada para informan dan tenaga lapangan di Madura yang telah bersusah payah untuk mendapatkan data, kami ucapkan terima kasih.

Akhirnya, semua isi dalam laporan ini masih perlu didiskusikan kembali dalam tim penelitian untuk menjadi laporan yang sebagaimana mestinya.

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	5
BAB III. TUJUAN DAN MAFAAT PENELITIAN	12
BAB IV. METODE PENELITIAN	13
BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN	16
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Nama Tabel	Hal.
Tabel 1. Pengetahuan masyarakat tentang Pilkada	20
Tabel 2. Hubungan antara Kualitas Parpol dan Pilihan Pemilih	22
Tabel 3. Alasan ikut kampanye	25
Tabel 4. Alasan Mengikuti Berita-berita tentang Pilkada	26
Tabel 5. Media kampanye yang digunakan selain Media Massa	27
Tabel 6. Keikutsertaan sebagai Pengawas/saksi dalam Pilkada	28
Tabel 7. Pengetahuan Masyarakat tentang Sumber Dana Pembuatan TPS ...	28
Tabel 8. Penggunaan hak Pilih dalam Pilkada	29
Tabel 9. Alasan Menjagokan Pasangan Calon	31
Tabel 10. Pengaruh Penilaian terhadap Pilihan dalam Pilkada	32
Tabel 11. Penyebarluasan Penilaian	32
Tabel 12. Penilaian Masyarakat tentang Kontestan Pilkada	35
Tabel 13. Hubungan antara Pengalaman Menjabat dan Perolehan Suara	37
Tabel 14. Pilihan dalam Pilkada	38
Tabel 15. Pasangan yang Memperoleh Suara terbanyak di daerah Pemilih ...	39
Tabel 16. Asal Daerah yang Sama antar Pemilih dengan Calon	39
Tabel 17. Kedekatan Hubungan antara Kontestan dan Masyarakat	40
Tabel 18. Figur Ideal Kepala Daerah.....	41
Tabel 19. Penilaian Masyarakat tentang Penyelenggaraan Pilkada	44

BAB I PENDAHULUAN

1. Latarbelakang

Keragaman sosio-kultural Indonesia sebagai kontribusi yang besar bagi tumbuh dan berkembangnya demokrasi yang berbasis pada pluralitas politik. Format Pilkada yang berada dalam era pembaruan politik untuk menghasilkan demokrasi yang substansial, bukan prosedural. Pilkada sebagai salah satu bagian integral dari proses demokratisasi di Indonesia adalah perwujudannya. Pilkada implementasinya di aras lokal, berimplikasi di tingkat nasional. Semenjak UU No. 32/2004 ditetapkan Oktober 2004, beberapa hal penting telah diproses. Salah satunya adalah pembentukan PP Pilkada.

Dalam UU No. 32/2004, hal penyelenggara Pilkada menjadi bagian dari kontroversi. KPUD dipandang mudah dikemudikan oleh DPRD. Selain itu, persyaratan partai politik mengajukan calon (partai dengan 15% kursi di DPRD) juga dipandang problematik. *Judicial review* yang diajukan oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) diluluskan oleh Mahkamah Konstitusi. Pasca *judicial review*, Depdagri mengadakan konsolidasi dengan Komisi Pemilihan Umum di daerah (KPUD) terutama dalam mengisi lubang-lubang yang ada di UU No. 32/2004. Salah satu adalah jika terjadi keperluan untuk menunda karena bencana atau hal lain. Dikeluarkannya perpu yang disempurnakan digunakan untuk mengisi kekosongan tersebut.

Dengan format baru pelaksanaan otonomi daerah setelah UU No.22 tahun 1999 diperbaiki menjadi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menunjukkan perubahan yang signifikan karena pemilihan Kepala daerah (Pilkada) secara langsung yang dimuat dalam pasal 24 ayat 5 UU Pemda, berbunyi: “ Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah bersangkutan”, mengindikasikan Pilkada sebagai wujud perubahan mendasar bagi proses



demokrasi di daerah yang ditandai dengan partisipasi dan penguatan aspirasi rakyat dalam menentukan pilihan pemimpin daerah secara langsung.

Pilkada secara langsung adalah perkembangan menarik dalam sejarah perpolitikan daerah di negeri ini dan momentum Pilkada merupakan momentum peletakan dasar bagi fondasi kedaulatan rakyat, dan system politik serta demokrasi di aras local. Peluang antusiasme masyarakat dalam mengapresiasi proses Pilkada secara langsung menunjukkan tingkat kesiapan partisipasi masyarakat dalam menyongsong pelaksanaan Pilkada untuk memilih pemeimpin yang tepat sesuai aspirasi rakyat. Mereka tak memikirkan bagaimana agar Pilkada langsung itu dapat terselenggara sesuai jadwal yang ditetapkan UU No. 32 Tahun 2004. Atau berpikir bagaimana menyiapkan Pilkada langsung secara demokratis dalam waktu singkat (sebab PP No. 6 Tahun 2005 baru dikeluarkan pemerintah). Atau memberi usulan atas kendala dan hambatan teknis KPU (provinsi dan kabupaten/kota) dalam mempersiapkan semua tahap Pilkada langsung, mencari solusi bagaimana agar pembiayaan Pilkada langsung via APBN dan APBD berlangsung mulus.

Sebaliknya partai-partai politik (partai) tampaknya sudah menginventarisasi peluang untuk mencalonkan kader-kader mereka di sejumlah daerah yang akan mulai menyelenggarakan Pilkada langsung, pada bulan Juni 2005. Sudah keniscayaan bagi partai-partai bahwa Pilkada langsung merupakan momen penting yang tak boleh dilewatkan, karena ia memperebutkan kekuasaan (eksekutif) di daerah.

Selama ini yang terlihat bahwa ada dua arus yang mulai membesar saat menjelang Pilkada langsung. *Pertama*, mantan pejabat di sejumlah daerah telah mempersiapkan pencalonan mereka jauh sebelum tahapan-tahapan Pilkada langsung oleh KPU (provinsi dan kabupaten/kota) digulirkan. Tim sukses bayangan sudah dibentuk dan mereka telah mengampanyekan calon mereka, paling tidak mulai melempar nama di sejumlah forum informal di mana pemuka dan warga berkumpul. Para mantan pejabat itu sangat beragam posisinya dari seorang bupati/walikota yang masih memangku jabatan hingga sekretaris daerah. Mereka tak hanya mencalonkan diri di daerah tempat mereka bekerja/memangku

jabatan namun juga di luar daerah. Seorang Bupati Banyuwangi (Jawa Timur) misalnya, sekarang tengah mempersiapkan pencalonannya di Kabupaten Jember. Seorang pejabat penting di Pemerintah provinsi Jawa Timur (otomatis tinggal di Surabaya), juga mencalonkan diri di Jember.

Fenomena ini sebagai mobilitas horizontal. Sebagian besar mereka yang menggunakan model mobilitas horizontal ini adalah kader parpol, atau paling kurang memiliki jaringan dengan struktur dan elite parpol di daerah tempat mereka akan mencalonkan diri.

Momentum Pilkada secara langsung sebagai proses pembelajaran politik masyarakat politik di daerah. Konteks pembelajaran politik ini meliputi beberapa hal, yaitu: (1) Pilkada secara langsung sangat menuntut kesiapan rakyat untuk bisa mengartikulasikan kepentingan-kepentingannya, sehingga bentuk sikap politiknya merupakan cerminan dari kebutuhan yang ingin diwujudkan oleh rakyat dan pemimpinnya; (2) Rakyat mempunyai kedaulatan penuh untuk mendefinisikan pilihan politiknya terhadap figure calon kepala daerah yang diinginkan secara benar dan tepat, sehingga kualitas partisipasi masyarakat dapat dipertanggungjawabkan secara langsung. Kemandirian ini dengan sendirinya mengeliminasi adanya potensi-potensi mobilisasi pemilih yang hanya legitimate oleh sebagian elite politik atau kelompok tertentu saja; (3). Rakyat sangat dituntut kedewasaan politiknya. Artinya mereka harus siap memilih dan menentukan kepala daerah dalam Pilkada sesuai pilihan politiknya.

Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk menjawab keingintahuan peneliti dalam upayanya mengungkapkan partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada. Setidaknya, ada 226 daerah yang melakukan hajatan pemilihan kepala daerah langsung pada tahun 2005. Artinya, rakyat mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin yang dikehendaknya.

Dalam pelaksanaan Pilkada langsung nanti penuh dengan harapan untuk menghasilkan pemimpin dengan kepercayaan kuat dari rakyat dan penuh harapan untuk

menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat. Tapi kepercayaan yang kuat itu tidak serta-merta membawa masyarakat keluar dari kemiskinan tanpa diikuti dengan kepemimpinan dan komitmen yang kuat. Terlepas dari berbagai kelemahan, pemilihan langsung diyakini sebagai pola rekrutmen pemimpin yang demokratis.

Tanpa adanya kesadaran atau melek politik, rakyat akan mengalami kesulitan dalam menentukan preferensi politiknya, termasuk dalam hal mengaktualisasi hak-hak politiknya, yang dalam hal ini lewat Pilkada. Dengan sistem Pilkada langsung tidak semata-mata untuk menghasilkan pemimpin yang memiliki legitimasi kuat dari rakyat, tetapi juga untuk menghasilkan pemimpin daerah yang bisa menjalankan mandat politik yang diberikan oleh rakyat, kehendak mayoritas. Persoalan yang muncul kemudian adalah apakah dalam Pilkada, rakyat sudah dapat menentukan pilihan politiknya dengan tepat, sesuai aspirasi dan preferensi politiknya? Persoalan ini menjadi lebih menarik karena mengambil lokasi Surabaya dimana aspek pluralitas politik cukup kental dan Surabaya menjadi tempat yang cukup potensial sebagai ajang praktik-praktik politik rakyat, diantaranya terlihat dari antusiasme rakyat dalam menganggapi keputusan DPRD kota Surabaya menolak LPJ walikota, dan fenomena penolakan calon wali kota untuk menandatangani kontrak politik.

2. Permasalahan Penelitian

- i. Bagaimana partisipasi politik warga kota Surabaya dalam Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung? Aspek yang diteliti dalam hal ini adalah sejauh mana tingkat otonomi warga dalam menentukan sikapnya memilih pemimpinnya. Apakah karena pengaruh mobilisasi partai politik semata, faktor primordialisme atau calon putra daerah atau karena unsure rasionalitas dan hati nurani?
- ii. Sampai sejauh mana kualitas partisipasi menentukan kualitas demokratisasi di aras lokal? Yang diteliti adalah bagaimana peranan dari unsur emosi, kultur paternalisme, sikap rasionalitas, kesadaran politik, hubungan pertemanan menentukan pilihan politiknya?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pilkada dan Calon Pemimpin Daerah

Tepatnya 15 Oktober 2004 terbitlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah yang memuat ketentuan tentang pemilihan kepala daerah langsung yang ditandatangani Presiden Megawati Soekarnoputri. Sebagai penjabarannya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 mengenai Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan pada 11 Februari 2005 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 3 Tahun 2005 untuk merevisi sejumlah ketentuan dalam UU No 32 tahun 2004 ditetapkan 27 April 2005 sebagai respons atas putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi. Berbarengan dengan keluarnya Perpu tersebut, pemerintah juga mengeluarkan PP No 17/2005 sebagai revisi atas PP No. 6 tahun 2005. Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amendemen menyebutkan: "Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis".

Sebelum ada UU No.32/2004 yang mengatur pemilihan Kepala daerah langsung begitu kuat perpolitikan di aras lokal terutama yang terkait dengan konflik pusat-daerah mewarnai pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilakukan DPRD. Sebagai contoh, adalah pemilihan walikota Kendari (Sulawesi Tenggara). Menurut data Litbang Kompas, pada September 2001, Gubernur Sulawesi Tenggara La Ode Kaimoeddin membatalkan keputusan DPRD Kendari yang telah menetapkan pasangan Mansyur Abu Nawas-Andi Muzakir hanya karena Mansyur yang pegawai negeri sipil belum dapat izin maju dalam pemilihan. Namun, Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno pada Maret 2002 lebih berpihak pada keputusan DPRD Kendari sekalipun Gubernur menolak pelantikan pasangan terpilih itu. Contoh adalah dalam pemilihan Gubernur Lampung periode 2003-2008 menjadi contoh keruwetan pemilihan kepala daerah. Pasangan Alzier Dianis Thabrani-Ansyori Yunus terpilih, tetapi pemerintah pusat membatalkan keputusan DPRD Lampung. Meski

dilakukan pemilihan ulang dan terpilih pasangan baru, persoalan belum terhenti ketika Mahkamah Agung menyatakan keputusan Menteri Dalam Negeri dinyatakan batal. DPRD Lampung pun bersikap menolak eksistensi gubernur saat ini. Selama lima tahun ke depan akan ada 473 Pilkada (33 provinsi dan 440 kabupaten/kota) dan yang berlangsung baru 121.

Ekperimentasi demokrasi di aras lokal mulai mendapatkan legitimasi semenjak lahirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pada penghujung September 2004 lalu. Pada pasal 24 UU No 32 Tahun 2004 tersebut menyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah diharuskan dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Selanjutnya, pasal 233 Ketentuan Peralihan menyebut bahwa untuk daerah yang kepala daerahnya mengakhiri masa jabatan pada tahun 2004 sampai Juni 2005, pelaksanaan Pilkada diselenggarakan secara langsung pada Juni 2005.

Hadirnya UU Pemda baru, sebanyak 173 kabupaten/kota dan 8 provinsi bersiap menghadapi Pilkada langsung pada Juni 2005. Sepanjang tahun 2005 sendiri, termasuk yang mengadakan Pilkada bulan Juni, ada 11 provinsi dan 215 kabupaten/kota yang harus mengadakan Pilkada secara langsung. Di satu sisi, hal ini positif karena partai politik ternyata kian realistis dengan mendukung calon yang populer, lepas dari latarbelakang afiliasi politiknya. Bisa juga positif karena permusuhan elite politik partai di Jakarta tidak mesti beresonansi (apalagi lebih kuat) di daerah. Di sisi lain, hal ini mengkhawatirkan karena merefleksikan semakin lemahnya peran ideologi (perjuangan rakyat) yang sebetulnya menjadi *raison d'etre* dari eksistensi partai politik ketika berdiri di awal abad ke-20.

Dengan melemahnya peran ideologi dalam membimbing kiprah partai dapat berakibat dominasi logika kepentingan dalam mengatur perilaku partai. Kita patut khawatir, karena kalau ini yang terjadi, bukan hanya politik arus atas dan arus bawah yang kita lihat, tetapi juga politik arus liar. Praktik pencalonan dalam Pilkada yang tetap saja ditentukan oleh pengurus pusat partai politik merupakan hal utama yang perlu diselesaikan terlebih dulu. Tidak ada artinya janji pengembalian kedaulatan rakyat ketika segelintir elite (*parpol*) yang menentukan pilihan kandidat. Berbeda dengan yang terjadi

di Amerika Serikat, misalnya dimana penjaringan calon gubernur atau walikota dilakukan melalui proses yang disebut *primary*, anggota partai politik diberikan kesempatan untuk memilih calon yang benar-benar didukung oleh parpol itu. Keterlibatan para anggota parpol ini menjadi basis utama legitimasi dalam proses penetapan calon. Hierarki kepengurusan parpol yang desentralistis memungkinkan pemilihan secara mandiri tanpa intervensi dari kepengurusan parpol di tingkat yang lebih tinggi (pusat).

Merujuk dengan permasalahan yang demikian besar, mungkin bisa dipertanyakan apa memang ada ukuran untuk kualitas Pilkada. Salah satu cara yang digunakan Jack Sneider yang melihat situasi Eropa Timur berdasarkan konteks nasionalisme — progresif, primordial, tradisional dan sipil. Yang terakhir menjadi penting karena bisa menjadi instrumen untuk melihat apa sebuah pemilu membawa keberhasilan dalam transisi demokrasi, khususnya bagi Indonesia yang dalam masa sebelumnya, khususnya pemerintah Orde Baru, kepala daerah lebih banyak yang berlatarbelakang militer (TNI) dipilih (baca: ditunjuk dan direstui pemerintah pusat, DPRD mengusulkan dan mengesahkan saja), dengan kecenderungan itu unsur demokrasi sangat jauh dari realitas. Atau demokrasi hanya memenuhi aspek prosedural saja, bukan substansi.

Aspek prosedural dan substansi dari Pilkada sebagai instrumen demokrasi adalah kualitas hasil Pilkada. Kualitas hasil Pemilu dilihat melalui ukuran-ukuran prosedural, hal itu lebih mudah daripada ukuran-ukuran substantif. Alasannya, karena ukuran itu berkaitan dengan persoalan teknis yang bisa dilihat, sedangkan ukuran substantif sulit disebabkan permasalahannya tidak bisa diidentifikasi secara visual.

Dalam menjelaskan peristiwa pemilu, yang pertama-tama perlu dilihat adalah perihal prosedural. Meski teknis, tapi ini menjadi penting karena faktor tersebut yang menuju pada analisis hasil. Asumsinya, Pilkada langsung akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang sah dan legitimatif.

Dilihat dari aspek prosedural, proses Pilkada dilakukan secara seragam di daerah-daerah, padahal realitas masing-masing daerah memiliki kekhususan (aspek lokalistik) dalam hal dinamika proses, karakter pemilih dan cara penyelesaian masalah. Dalam

kaitan ini, cara-cara menggalang dukungan juga berbeda-beda. Meskipun pada akhirnya, dari segi dinamika politik, proses Pilkada relatif masih menghasilkan birokrat ketimbang pemimpin dengan latar belakang berbeda. Politisi menjad kepala daerah juga bukan merupakan hasil sebagian besar Pilkada.

Satu hal penting lain adalah dari segi konflik, sesedikit apapun konflik yang terjadi dalam Pilkada, hal tersebut menunjukkan bahwa Pilkada memiliki dinamika internal demokrasi. Kecenderungan muncul dan menguatnya sentimen-sentimen primordial, baik kewilayahan, sub kultur, sub etnis, maupun agama. Hal ini bisa menjad stimulus bentrokan, karena sebageian pemilih memandang sentimen ini sebagai cara untuk memenangkan calon yang didukungnya. Sentimen seperti itu menunjukkan tidak pentingnya program, visi, dan misi calon. Apabila hal ini yang terjadi, kualitas demokrasi dari segi substansi di aras lokal perlu ditingkatkan, dimana rakyat memerlukan pendidikan politik untuk menumbuhkan kesadaran politiknya. Dengan kesadaran politik rakyat diasumsikan bisa menentukan pilihannya sendiri.

Partisipasi politik didefinisikan secara luas atau sempit oleh berbagai penulis tergantung dari pendekatannya. Kajian klasik partisipasi politik oleh Nie dan Verba (1972:2) mendefinisikannya sebagai kegiatan legal oleh warga perorangan yang secara langsung atau tidak langsung ditujukan untuk mempengaruhi pilihan petinggi pemerintah dan atau tindakan mereka". Sementara itu Richardson (1996) dan Cunill (1991) mencoba menghubungkan partisipasi politik dengan demokrasi politik. Partisipasi diungkapkan dalam tindakan perseorangan dan kolektif yang mencakup pemungutan suara, kampanye, kontak, tindakan kelompok dan protes yang semuanya diarahkan untuk mempengaruhi wakil-wakil pemerintah.

Kajian politik yang berfokus pada individu pemilih memberikan model empiris baru tentang masyarakat demokratis, karena disini yang dipelajari adalah kapasitas individu untuk menjalankan fungsinya dalam system politik demokrasi dimana warganegara bertindak (memilih/memberikan suara pada Pemilu) karena mereka mempunyai motivasi untuk mencapai tujuan secara efektif tentang perilaku politiknya itu. (Garmines dan Huckfeldt, 1996)

Dalam konteks negara bangsa, penerapan otonomi (desentralisasi) daerah tiada lain merupakan suatu upaya untuk menumbuhkembangkan kembali partisipasi masyarakat (*participatory democracy*) dalam konteks demokrasi perwakilan (*representative democracy*). Artinya bahwa penerapan konsep dari, oleh dan untuk rakyat yang merupakan konsep dasar demokrasi yang dalam konteks kekinian penerapannya tidak lagi dapat dilaksanakan secara langsung, akan tetapi secara tidak langsung yang berdasarkan perwakilan (*representative democracy*) melalui otonomi daerah dipandang lebih mendekati kenyataan.

Dengan demikian, berhasil tidaknya penerapan otonomi daerah dalam suatu daerah atau komunitas, tidak saja karena adanya keterlibatan secara menyeluruh dari *stakeholders* (pemerintah, swasta, masyarakat, *civil society organization*) yang ada dalam komunitas tersebut, tetapi yang lebih penting adalah karena adanya konsep keterwakilan dalam masyarakat, yang di dalamnya mencakup sistem yang representatif. Berkaitan dengan itu, maka menarik kiranya untuk melakukan studi komprehensif mengenai partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu 2004 ini dalam konteks penciptaan masyarakat yang demokratis dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Faktor-faktor yang menjadi penghambat munculnya partisipasi warga yaitu: (1) hubungan kekuasaan; (2) tingkat organisasi warga; (3) kecakapan partisipatif; (4) kemauan politik.

i. Hubungan kekuasaan

Dari studinya di Amerika Latin Schonwalder (1997:775) berpendapat: kaum elit daerah, pemerintah daerah dan para pelaku lainnya yang bekerja di daerah itu seringkali mengkooptasi gerakan dengan tujuan memajukan agenda kepentingan mereka sendiri. Partisipasi masyarakat sendiri dapat diwujudkan (*representative*) melalui proses pemilihan (*election*) yang baik (dengan penerapan konsep *transparency* sehingga peranan masyarakat dapat dilihat dari perwujudan kekuatan DPRD di dalam mengontrol pelaksanaan kebijakan oleh eksekutif. Program desentralisasi yang dijawantahkan kedalam program otonomi daerah berdasarkan UU 22/1999 dan UU 25/1999 diterima sebagai suatu keharusan/keniscayaan yang mau tidak mau harus dijalankan oleh pemerintahan di daerah. Meskipun demikian program ini tetap mengandung berbagai kelemahan yang mengharuskan penyempurnaan terus-menerus dalam hal pengembangan

konsep dasarnya, dan perangkat-perangkat hukumnya, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintahan di daerah-daerah. Proses kebijakan politik jauh dari sifat elitis, meski dalam prakteknya seringkali menstimulus berkembangnya banyak deviasi demokrasi, dari mulai politik dagang sapi, politik uang, hingga eksklusivisme gaya politik elit.

ii. Tingkat Kecakapan Warga

Dalam hal ini Robinson (1998) dan juga Herzer dan Pirez (1991) mengatakan bahwa warga kebanyakan bisa menngahadapi jaringan kekuasaan yang ada jika memiliki sejarah organisasi masyarakat bawah atau gerakan social yang efektif. Di Indonesia kesempatan untuk mengembangkan *civil society* pada tingkat local masih sulit difasilitasi seluas mungkin. Andalan otonomi daerah ke depan untuk pemerintahan yang terdesentralisasi justru adalah partai politik, bukan pemerintah. Sebab asal usul pemerintah mestinya nanti adalah partai politik yang dilingkungi oleh keberadaan masyarakat (*civil society*) yang kokoh. Terkait dengan itu, gagasan untuk mempunyai partai politik local, untuk menyelenggarakan pemilu atas prinsip distrik, dan pemilihan langsung untuk kepala daerah harus diterima sebagai pertimbangan yang penting bagi proses institusionalisasi demokrasi di daerah. Di samping itu, masalah seperti apakah daerah dapat mempunyai pengaturan politik yang berbeda dengan pengaturan politik nasional mulai untuk dipikirkan.

Perlunya makin dikembangkan kesadaran masyarakat atas kebebasannya bergabung dan mengorganisasi diri dalam kelompok-kelompok kepentingan. Sosialisasi pengetahuan mengenai hal ini dapat diberikan melalui kelompok-kelompok target, yang dipertimbangkan paling memerlukan kebutuhan seperti ini, misalnya petani, pedagang kecil ataupun pekerja industri.

iii. Kecakapan Partisipatif

Secara umum, partisipasi dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukannya oleh warga negara dalam rangka mempengaruhi proses pembuatan kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, definisi partisipasi juga dapat mengacu pada pengertian partisipasi politik, seperti yang diungkapkan oleh Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson (1990), yaitu: "...tindakan

warga negara yang ditujukan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan kenegaraan (*governmental decision making*). Perwujudan dari partisipasi tersebut dapat dilakukan, baik secara individu atau berkelompok, bersifat spontan atau terorganisir, secara berkelanjutan atau sesaat, serta dengan cara damai atau kekerasan.

Dilihat dari sifatnya, partisipasi dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu (Huntington dan Nelson, 1990), pertama, partisipasi otonom atau mandiri, yaitu suatu bentuk partisipasi yang lahir dari kesadaran masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan publik, kedua, partisipasi mobilisasi, termasuk di dalamnya partisipasi seremonial yaitu, bentuk partisipasi yang digerakkan oleh orang atau kelompok tertentu, umumnya bagi negara berkembang dilakukan oleh kelompok elit tertentu, bukannya berangkat dari kesadaran masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lemahnya kecakapan partisipatif pada berbagai tingkatan partisipasi menjadi masalah utama munculnya partisipasi warga.

Masyarakat lokal secara umum harus merasa bahwa mereka tidak hanya menjadi subyek dari kebijakan pemerintah yang berjarak darinya, tetapi seseorang harus diperhatikan pandangan semenjak pemerintah lokal menjadi milik mereka dan pemerintah itu ada untuk keuntungan mereka bukan untuk yang lain. Kedua, pilihan pemerintah dibuat oleh masyarakat itu sendiri sesuai dengan kepentingan mereka. Ketiga, pemerintah lokal harus mendasarkan pemikirannya bahwa adanya kebutuhan untuk sensitif terhadap kebutuhan lokal dan artikulasi kebutuhan mereka sehingga mereka selalu mendapatkan dukungan lokal. Keempat, partisipasi lokal dapat menyediakan situasi atau momentum guna mempercepat pembangunan dengan memanfaatkan sumberdaya lokal yang ada secara optimal.

iv. Kemauan Politik

Hambatan dalam meningkatkan partisipasi juga disebabkan tidak adanya kemauan politik dari para pejabat pemerintah dalam melaksanakan perundang-undangan yang telah diciptakan untuk tujuannya. (Rosenberg, 1994; Bohme, 1997) Pada masa Orde Baru, angka keikutsertaan masyarakat (warga negara) dalam pemilu selalu mencapai angka yang tinggi.

BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- i. Memberikan gambaran secara empirik tentang partisipasi politik warga kota Surabaya dalam Pilkada.
- ii. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik warga dalam menentukan pejabat pemerintah daerahnya.
- iii. Mengungkapkan tentang apakah masih dominan keterkaitan antara sikap fanatisme, kultur paternalisme dengan partisipasi politik warga dalam menentukan pemimpin daerah.

2. Manfaat Penelitian

- i. Penelitian ini ditujukan untuk memperkaya kajian partisipasi politik dan perpolitikan local di Indonesia.
- ii. Kegiatan penelitian ini juga dimaksudkan untuk menyampaikan informasi ilmiah tentang factor-faktor yang bisa menjelaskan tentang tingkat kemandirian sikap politik warga dalam memilih pemimpinnya.
- iii. Secara praktis studi ini bisa memberi manfaat pada pemahaman masyarakat awam dan ilmiah tentang perlunya meningkatkan kemandirain sikap politik untuk meningkatkan kualitas partisipasi politik yang memiliki kontribusi pada kualitas demokratisasi di aras local.



BAB IV

METODE PENELITIAN

1. Sumber Data dan Lokasi Penelitian

Sumber data penelitian ini adalah warga kota Surabaya. Sumber data tersebut diwawancara dan mengisi kuesioner. Dalam menentukan subyek penelitian baik yang diwawancara maupun mengisi kuesioner ditentukan secara purposif dengan menggunakan kriteria, yaitu ikut dalam pemilihan kepala daerah langsung di Surabaya. Subyek penelitian (narasumber/informan) dan responden yang dipilih secara purposif, artinya individu-individu yang menjadi subyek dijangkau sesuai kebutuhan, dalam hal ini peneliti menjangkau subyek penelitian dengan cara mengumpulkan informasi tentang alasan menentukan pilihan pada calon tertentu. Setelah didapat informasi itu selanjutnya peneliti menjangkau sebagian dari subyek penelitian untuk diwawancara. Kegiatan menjangkau subyek penelitian diawali dengan observasi di daerah penelitian. Jumlah narasumber dipilih untuk bisa sedikit banyak menggambarkan keadaan pemilih di kota Surabaya. Alasannya adalah kota Surabaya melaksanakan Pilkada pada bulan Juni 2005, dan menjadi bagian penting dalam konteks memahami perpolitikan di aras lokal semenjak UU No.32/2004 diimplementasikan.

Penelitian yang dilakukan di Kota Surabaya pada bulan Juli-Agustus, tahun 2005 respondennya sebanyak 40 orang. Dari jumlah tersebut dipilih lima orang untuk diwawancara secara mendalam. Jadi subjek penelitian didapatkan melalui proses penjangkauan sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan latar belakang sosial-ekonomi calon informan/responden. Seluruh responden diminta untuk mengisi kuesioner agar didapat data yang objektif tentang pilihan dan partisipasi politik mereka dalam Pilkada Langsung di Kota Surabaya. Kemudian dipilih sebanyak lima orang sebagai wakil dari kelas sosial-ekonomi responden. Lima orang tersebut diwawancara secara khusus sehingga diperoleh gambaran secara lengkap tentang partisipasi politik mereka pada sebelum, dan saat Pilkada langsung di Kota Surabaya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner, wawancara tak berstruktur dan studi pustaka. Kuesioner digunakan untuk menjaring informasi tentang partisipasi politik masyarakat. Dalam wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih leluasa tanpa terikat oleh suatu pertanyaan yang dipersiapkan sebelumnya. Sedangkan studi pustaka dilakukan untuk memperoleh dasar-dasar pemikiran dan perumusannya. Selain itu, juga dibutuhkan untuk mencari data-data lain sebagai bahan tambahan, perbandingan dan penegasan atas suatu fenomena, kasus dan data-data yang ditemukan di lapangan. Jadi dengan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan subyek penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok pertanyaan yang diajukan sebagai acuannya. Disini subyek diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menceritakan serbagai hal tentang dirinya sehingga wawancara dilakukan secara bebas dan karena itu disebut dengan wawancara tidak berstruktur. Pedoman wawancara ada kemungkinan berubah disesuaikan dengan kondisi lapangan. Jadi digunakannya interview guide peneliti menghendaki jawaban yang lebih luas, rinci, detail dan lengkap serta bisa menggambarkan kondisi seutuhnya, tetapi tetap relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

3. Teknis Analisa Data

Analisis data dilakukan peneliti sejak turun ke lapangan. Artinya, analisis tidak hanya dilakukan pada saat data dari wawancara sudah terkumpul lengkap tetapi sejak proses penelitian ini berlangsung sampai sesudah pengumpulan data berakhir. Setelah data ditranskripsikan dengan lengkap, didukung dengan data primer dan sekunder yang diperoleh selama penelitian maka langkah-langkah yang ditempuh dalam menganalisis mencakup tiga langkah yaitu: berkaitan dengan penyederhanaan data, penyajian data dan penyimpulan (Miles dan Huberman, 1992:15-20) Sementara itu data dari kuesioner disajikan dalam bentuk frekuensi dan diinterpretasi sesuai keperluan permasalahan penelitian.

4. Identitas responden dan Informan

No.	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Kecamatan	Penghasilan	Pekerjaan
1	Ferama Nunwati	24 th	P	Rungkut	20.000/hari	Wiraswasta (Pedagang)
2	Diah	28 th	P	Krempangan	10.000/hari	Wiraswasta (pedagang)
3	Siti Farida	18 th	P	Krempangan	-	Mahasiswa
4	Romy Subiantoro	26 th	L	Rungkut	650.000/bulan	Pegawai swasta (administrasi)
5	Hengky Harianto	24 th	L	Rungkut	100.000/minggu	Buruh Pabrik
6	Umar Muslich	34 th	L	Bubutan	100.000/minggu	Kuli Bangunan
7	Wike Asrini	34 th	P	Bubutan	15.000/hari	Wiraswasta
8	Hari Irawan	35 th	L	Rungkut	350.000/minggu	Wiraswasta (pedagang)
9	Johannes N	44 th	L	Rungkut	1.500.000/bulan	Pegawai swasta (sales)
10	Etik Yulastri	36 th	P	Rungkut	-	Ibu Rumah Tangga
11	Edi Darminto	54 th	L	Sukolilo	1.900.000/bulan	PNS
12	Ny. Muryati	51 th	P	Rungkut	1.500.000/bulan	PNS
13	Woro Wikan Maheswari	23 th	P	Rungkut	10.000/hari	Mahasiswa/wira swasta (pedagang)
14	Sukarni	50 th	P	Gubeng	10.000/hari	Wiraswasta (PKL)
15	Sabari	54 th	L	Margorejo	10.000/hari	Wiraswasta (PKL)
16	Baharudin	40 th	L	Margorejo	550.000/bulan	Satpam
17	Soqeh Arfin	29 th	L	Gubeng	250.000/bulan	Satpam
18	Turimin	69 th	L	Gubeng	10.000/hari	Tukang Becak
19	Deni Mathlessi	23 th	L	Tambaksari	15.000/hari	Tukang Becak
20	Sugeng Ariyanto	43 th	L	Tambaksari	600.000/bulan	Satpam
21	Agustin Suswati	40 th	P	Tambak Sari	1.000.000/bulan	Guru Swasta
22	Nino	33 th	L	Tegal Sari	700.000/bulan	Guru Swasta
23	Azrin	37 th	L	Tambak Sari	700.000/bulan	Guru Swasta
24	Rintil Pinarti	42 th	P	Tambak Sari	1.000.000/bulan	Guru Swasta
25	Titik Andayani	45 th	P	Rungkut	1.500.000/bulan	Pegawai Swasta
26	Wahyu Eko P	23 th	L	Gubeng	-	Mahasiswa
27	Sri Agustiyah	42 th	P	Rungkut	1.000.000/bulan	Guru Swasta
28	Jaswadi	42 th	L	Sukolilo	800.000/bulan	Guru Swasta
29	CMM. Emi Sumintarsih	42 th	P	Sukolilo	1.000.000/bulan	Guru Swasta
30	Sri Endah Retnaningsih	40 th	P	Gubeng	850.000/bulan	Guru Swasta
31	Moch. Rizaldi	29 th	L	Semampir	25.000/hari	Wiraswasta/PKL
32	Wanto	22 th	L	Semampir	20.000/hari	Tukang Parkir
33	Arnol Sakti Sektiawan	22 th	L	Semampir	50.000/hari	Wiraswasta (pedagang)
34	Rikarningsih	30 th	P	Gubeng	-	Ibu Rumah Tangga
35	Jumain Romli	39 th	L	Gubeng	300.000/bulan	Pegawai swasta
36	Misni	50 th	L	Gubeng	600.000/bulan	Satpam
37	Suyono	40 th	L	Gubeng	20.000/hari	Wiraswasta/PKL
38	Sulimah	35 th	P	Gubeng	15.000/hari	Wiraswasta/PKL
39	Sriyati	50 th	P	Tandes	1.000.000/bulan	Wiraswasta
40	Inggil Mawarsih	23 th	P	Banyu Urip	-	-

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Calon-calon Walikota dan Calon-calon Wakil Walikota yang ikut Pilkada

Berdasarkan Surat Keputusan KPU Surabaya Nomer 128/KPU/V/2005, empat pasangan cawali-cawawali yang lolos verifikasi adalah Bambang DH-Arif Afandi (PDIP), Alisjahbana-Wahyudin Husein (PKB), Erlangga Satriagung-AH Thoni (PD-PAN) dan Gatot Sudjito-Benyamin Hilly (Golkar-PDS) (Kompas 15 Mei). Pengumuman calon tetap cawali-cawawali Surabaya itu mendapat penjagaan ketat dari puluhan aparat kepolisian, karena sebelumnya sempat beredar isu akan ada aksi demo yang menolak pencalonan salah satu pasangan cawali-cawawali. Keempat pasangan cawali-cawawali tersebut telah melewati proses verifikasi (penelitian) administrasi yang dilakukan KPU Surabaya selama hampir satu bulan. Selanjutnya pihak KPU Surabaya segera melakukan pengundian nomer urut Cawali-Cawawali yang nantinya akan dipakai acuan untuk cetak surat suara. Sejak penetapan empat pasangan cawali-cawawali tersebut, segala tindak tanduknya mendapat pengawasan dari Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Surabaya, terutama berbagai kegiatan dan pelanggaran yang dilakukan diluar masa kampanye.

i. Pasangan Bambang DH dan Arif Afandi

Calon ini memulai kampanye di Kecamatan Sawahan, Surabaya. Bambang mengajak warga untuk meneruskan program-program pemerintah yang masih tertunda. Berbicara di hadapan ratusan warga, Bambang yang mantan walikota Surabaya itu mengingatkan, agar masyarakat tidak tertipu dengan janji-janji kosong para kandidat. "Omong kosong, kalau ada calon walikota yang berjanji Surabaya bisa bebas banjir," kata dia. Kampanye juga dilengkapi dengan hiburan orkes dangdut. Sehingga, massa yang berkumpul bisa bergoyang bersama pasangan calon mengikuti alunan musik melayu. (Kantor Berita Antara, 13 Juni 2005)

ii. Pasangan kedua adalah Erlangga-Thony

Calon kedua adalah Erlangga-Thony yang memanfaatkan waktu kampanye dengan menggelar pengobatan gratis di delapan titik. Tenaga medis melayani masyarakat selama satu jam, lalu berpindah lain. Pasangan calon yang juga berkampanye ialah pasangan Alisjahbana-Wahyudin Husein. Pasangan ini berkampanye di kawasan pedagang kaki lima (PKL) Tugu Pahlawan.

iii. Pasangan Alisjahbana dan Wahyudin

Pasangan ini dalam kampanyenya berniat menata PKL. Para PKL itu mau memilih pasangan itu, asalkan tidak ada penggusuran dari lapak mereka. Para PKL juga beramai-ramai minta uang dari pasangan ini.

iv. Pasangan Gatot Sudjito dan Benyamin Hili

Mereka memulai kampanye di lapangan Mundu, Surabaya. Meski ada fasilitas hiburan orkes dangdut dan barongsai, terlihat hanya diminati para pelajar sekolah dasar, yang mengaku datang karena memang hanya tertarik dengan musik dangdutnya saja. Sebelum berkampanye secara terbuka, keempat pasangan calon walikota dan wakil walikota Kota Surabaya itu lebih dulu memaparkan visi misinya di hadapan anggota dewan pada rapat paripurna. Pemaparan visi misi, sempat diwarnai dengan aksi unjuk rasa sejumlah elemen masyarakat. Aliansi Forum Buruh Mahasiswa Surabaya (AFBMS), sabar menunggu sampai semua pasangan calon memaparkan visi misinya.

2. Kontrak Politik dengan Calon

Dalam sistem demokrasi, sirkulasi kepemimpinan politik merepresentasikan demokrasi formal-prosedural, di mana demokrasi substansial harus tetap diperjuangkan. Memang salah satu parameter demokrasi adalah diselenggarannya pemilihan kepada pemerintahan secara reguler dan damai untuk mengganti pemimpin. Namun yang menjadi perhatian sebenarnya tidak sekadar formalitas demokrasi itu. Para politisi seringkali

berbicara demokrasi sebagai lancarnya pergantian pemegang kekuasaan. Karena demokrasi adalah sebuah struktur (arena), tempat kekuasaan diperdebatkan termasuk watak dan arahnya. Substansi demokrasi adalah penghargaan terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, transparansi, kebebasan berekspresi, anti kekerasan dan lain sebagainya. Regulasi dan kebijakan yang ditetapkan mengacu pada prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan bersama. Karenanya kontrak politik menjadi bagian penting dalam proses menentukan pemimpin politik, tidak saja untuk menjamin konsistensi antara janji yang dikemukakan dalam kampanye dengan program yang bakal direalisasinya ketika calon-calon kepala daerah terpilih nantinya.

Kontrak politik antara rakyat sebagai pemilih dan calon kepala daerah merupakan salah satu langkah strategis tidak hanya untuk belajar berdemokrasi (tidak mengobrol janji kepada calon-calon pemilih), melainkan sebagai upaya memecahkan kebuntuan politik yang terjadi selama ini di daerah. Artinya, kepemimpinan daerah selama ini bukan kepemimpinan yang berdasar atau berpijak pada hak-hak rakyat, karena ada unsur kekuatan politik dari luar daerah tersebut yang bermain menentukan ruang gerak dan dinamika perpolitikan lokal. Kontrak politik juga berarti adanya *political will* yang kuat dari calon-calon pemimpin daerah untuk konsisten mengakomodasi berbagai nilai-nilai perubahan sosial, ekonomi, budaya dan politik yang saat ini dalam tatanan globalisasi. Jadi kontrak politik menjadi roh yang bisa menghidupi demokratisasi di aras lokal.

Kontrak politik juga dapat menjadi sebagai alat kontrol dari pemilih atas program, kebijakan atau komitmen yang dijalankan oleh kepala daerah atas janji-janji yang diungkapkan dalam kampanye. Apabila ada calon kepala daerah tidak mau melakukan kontrak politik dengan rakyat sebagai pemilih, maka rakyat tidak wajib memilihnya untuk menjadi kepala daerah pada pilkada secara langsung nanti. Karena calon kepala daerah yang tidak mau melakukan kontrak politik, berarti mereka tidak memiliki komitmen untuk berpihak kepada kepentingan rakyat.

Beberapa calon saja yang mau menandatangani kontrak politik itu. Pasangan Bambang DH dengan Arief menolak untuk membubuhi tandatangannya. Para pengunjuk rasa menyesalkan sikap kandidat yang menolak memberi tanda tangan. Padahal kontrak politik itu sangat penting untuk menguji komitmen mereka. Apakah kelak setelah mereka

terpilih sebagai walikota akan tetap memperjuangkan aspirasi, sesuai dengan janji-janji yang akan mereka obral saat kampanye, atau justru sebaliknya. Keempat pasangan calon tersebut untuk menandatangani kontrak politik. Menurut salah seorang informan (ikut berunjuk rasa karena ada calon yang tidak bersedia menandatangani kontrak politik), mengatakan bahwa:

“Kontrak politik itu berisi delapan komitmen, yaitu, pemberantasan korupsi, pendidikan dan kesehatan, transparansi dan efisiensi APBD, partisipasi publik dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan, pencabutan kebijakan yang tak memihak rakyat, penyelesaian masalah rakyat miskin, tata ruang kota dan lingkungan, dan perbaikan moralitas masyarakat.”

Untuk itulah, dalam pilkada secara langsung rakyat harus membuat sebuah gebrakan yang berani untuk menolak calon kepala daerah yang tidak berani melakukan kontrak politik.

Ada keterkaitan erat antara calon pemimpin kepala daerah yang ditentukan berdasar pemilihan kepala daerah dengan peran partai politik. Sebagaimana disinyalir oleh *Juan J Linz* dan *Alfred Stepan* (1996), partai politik sebagai salah satu memiliki tempat penting dalam konsolidasi demokrasi modern. Kajian yang dilakukan oleh mereka menunjukkan besarnya perannya yang dapat dimainkan oleh partai politik, sehingga mereka bersimpulan bahwa partai politik sebagai pilar demokrasi. Dengan lain kata, bahwa partai politik tidak terlepas dari fungsinya untuk menyeleksi pemimpin. Pola seleksi (rekrutmen) yang diajukan parpol dalam Pilkada itu masih diwarnai oleh realitas bahwa calon independen ditutup. Demokrasi umumnya diukur dari tiga hal: partisipasi rakyat, kompetisi, dan akuntabilitas. Partisipasi politik rakyat hingga pelaksanaan Pilkada terlihat sudah baik.

Hal ini terlihat jelas dalam kompetisi Pilkada, partai politik yang ada masih menjual figur atau jargon tertentu meski menggunakan teknik modern seperti televisi, internet, pengumpulan pendapat, dan strategi politik lainnya. Akan tetapi hanya sedikit yang menjual program secara jelas dan lugas. Hal ini tidak terlepas dari perilaku partai politik serta aktor-aktor politik. Hal seperti ini kurang sekali mendukung perubahan ke arah demokratisasi karena pelaksanaan pemilu hanya satu bagian dari partisipasi,

delegasi, dan aspirasi rakyat. Tetapi bagaimanapun warga kota Surabaya masih menunjukkan antusiasnya dengan berpartisipasi dalam Pilkada. Kecenderungan ini muncul karena warga kota Surabaya memiliki pengetahuan tentang Pilkada langsung. Data menunjukkan, seluruh responden penelitian ini (100%) menyatakan mengetahui Pilkada Langsung di Surabaya. Yang mereka ketahui terbanyak adalah tanggal pelaksanaan Pilkada, 27 Juni 2005 (95%) dan yang paling sedikit diketahui adalah kepemilikan kartu pemilih dan keakuratan data (5%). Masyarakat mengetahui tanggal pelaksanaan secara pasti karena sosialisasinya dinilai cukup baik.

Tabel 1. Pengetahuan Masyarakat tentang Pilkada

Kategori	Pilihan	N %
Tahu 100%	1	95
	2	70
	3	57,5
	4	22,5
	5	70
	6	45
	7	57,5
	8	5
Tidak Tahu 0%		
	1	0
	2	0
	3	0
	4	0
	5	0

Sumber: data primer

Keterangan:

Kolom Tahu:

1 Tanggal pelaksanaan Pilkada 27 Juni 2005

- 2 Jumlah kontestan adalah 4 (empat) pasang Cawali-cawawali
- 3 Lembaga penyelenggara Pilkada adalah KPU Daerah
- 4 Semua kontestan merupakan tokoh lokal terbaik
- 5 Mengetahui semua nama kontestan
- 6 Semua kontestan diusulkan oleh partai politik
- 7 Pemilih adalah penduduk Surabaya
- 8 o Pemilih mempunyai kartu Pemilih
o Daftar nama pemilih kurang akurat karena banyak penduduk yang sudah meninggal /pindah tetap terdaftar

Keterangan:

Keterangan Kolom Tidak tahu

1. Saya tidak tertarik atau merasa tidak berkepentingan dengan Pilkada
2. Saya merasa Pilkada hanya menguntungkan sekumpulan elit politik
3. Saya merasa Pilkada merupakan bentuk pemborosan karena menghabiskan banyak dana
4. Saya tidak mendapat/mempunyai kartu pemilih
5. Lain-lain

2. Partai Politik dan Dukungan pada Pemenangan Calon

Partai politik memiliki andil besar dalam menjaring calon-calon yang ditampilkan untuk menjalankan kompetisi kekuasaan dalam arena Pilkada. Data berikut memberikan gambaran tentang adanya hubungan antara calon yang diusulkan oleh parpol dengan yang dipilih oleh masyarakat. Partai politik yang memajukan kepala daerah terpilih harus memaksimalkan fungsi pengawasannya. Walaupun hal ini agak sulit, nampaknya partai bergaya oposisi adalah pilihan yang harus dilakukan parpol. Sekalipun dia yang memajukan Kepala daerah/wakil terpilih. Hal lain adalah, partai politik masih sulit untuk menghindari strategi kekuatan ekonomi dalam membuat peraturan daerah. Artinya, Perda yang disusun bukan tawar menawar orang tertentu, tetapi murni aspirasi masyarakat untuk kepentingan bersama warga kota Surabaya dalam segala aspek kehidupannya.

Tabel 2. Hubungan antara Kualitas Partai Politik dan Pilihan Pemilih

Kategori	Pilihan	N %
Hubungan antara Kualitas Partai Politik dan Pilihan	1	55
	2	45

Sumber: data primer

Keterangan:

1. Ya, karena selalu ada kesepakatan antara parpol dan calon yang diusulkan.
2. Tidak, karena tergantung pada kemampuan individu dan kepemimpinan cawali-cawawali.

Selain partai politik, secara hipotetik yang perlu dianalisis dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat. Artinya adalah bagaimana partisipasi masyarakat, dan kualitas partisipasi itu sendiri dalam menentukan kepala pemerintah daerah. Semakin besar dan baik kualitas partisipasi masyarakat maka kelangsungan demokrasi akan semakin baik juga, sebaliknya semakin kecil dan rendah kualitas partisipasi masyarakat maka semakin rendah kadar demokrasinya. Partisipasi politik didefinisikan secara luas atau sempit tergantung dari pendekatannya.

Dalam berita yang disiarkan kantor berita Antara bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya membantah dugaan adanya penggelembungan jumlah pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) periode 2005-2010 di wilayah setempat. Anggota KPU Surabaya bidang pendataan pemilih, yang dihubungi mengatakan: "berdasarkan hasil pendataan sementara yang telah dilakukan, jumlah pemilih di Surabaya sekitar 2,039 juta orang. "Jumlah pemilih itu masih belum pasti, karena harus dilakukan pendataan ulang. Setelah itu, KPU mengeluarkan daftar pemilih sementara dari hasil pendataan tersebut," lanjutnya.

Daftar pemilih sementara itu kemudian diserahkan kepada PPK (Panitia Pemilih Kecamatan) untuk dilakukan verifikasi ulang sebelum dikeluarkan daftar pemilih tetap. Sebelumnya, Ketua DPRD Surabaya Musyafak Rauf mensinyalir adanya penggelembungan jumlah pemilih, dari sekitar 1,6 juta orang pada pemilu 2004 menjadi lebih dari dua juta orang pada Pilkada nanti. Menurut Edward, jumlah pemilih di

Surabaya pada pemilu legislatif dan presiden 2004 lalu sekitar 2,01 juta orang dan yang menggunakan hak pilihnya sekitar 1,6 juta hingga 1,7 juta orang. Artinya adalah jumlah pemilih yang menggunakan hak suara, kalau jumlah pemilih keseluruhan sekitar dua juta orang. (Antara news, 28 April, 2005, KPU Surabaya Bantah Penggelembungan Pemilih Pilkada)

Data pemilih bisa memicu kerawanan konflik dalam Pilkada sehingga pihaknya meminta kepada semua pihak yang terlibat dalam pendataan pemilih untuk tidak melakukan manipulasi. Sesuai PP Nomer 6 tahun 2005, pemilih adalah masyarakat yang sudah berdomisili di Surabaya selama enam bulan sebelum pelaksanaan Pilkada yang dibuktikan dengan KTP

Keterlibatan partai politik dalam pemenangan calon walikota-wakil walikota dapat kita lihat pada ada/tidaknya Posko dan juga aktivitas dari Posko tersebut. Posko terbanyak adalah Posko dari pasangan calon Bambang DH-Arief Affandi (71,43%), dan yang paling sedikit adalah Posko dari pasangan calon Gatot Sudjito-Benyamin Hilly (3,57%).

Posko yang didirikan itu melakukan berbagai kegiatan/aktivitas. Aktivitas dari Posko tersebut antara lain, yaitu (1) temu kader/tim sukses, (2) rapat konsolidasi, dan (3) pemberian layanan/bantuan kepada masyarakat. Yang diberikan oleh Posko pasangan calon/parpol terhadap warga di daerah sekitar Posko bermacam-macam. Kontribusi Posko kepada warga berupa pemasangan lampu penerangan jalan (38,46%), pemberian hadiah (26,92%), perbaikan jalan (15,38%), pemberian layanan kesehatan secara gratis (11,54%), dan pembagian sembako/uang (7,69%). Meskipun kecil jumlahnya ternyata pembagian uang masih ada.

Dampak dari adanya Posko dirasakan cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari jumlah Posko dari pasangan Bambang DH-Arief Affandi yang menyebar ke seluruh daerah (71,43%) ternyata juga berpengaruh terhadap kemenangan pasangan calon tersebut (97,5%). Begitu pula dengan pasangan Gatot Sudjito-Benyamin Hilly yang menang di daerah sekitar Posko. Meskipun ada pula di beberapa daerah yang tidak seperti itu.

Dalam konteks negara-bangsa, penerapan otonomi daerah tiada lain merupakan suatu upaya untuk menumbuhkembangkan kembali partisipasi masyarakat (*participatory*

democracy) dalam konteks demokrasi perwakilan (*representative democracy*). Dengan demikian, berhasil atau tidaknya penerapan otonomi daerah dalam suatu daerah atau komunitas tidak saja karena adanya keterlibatan secara menyeluruh dari stakeholder (pemerintah, swasta, masyarakat, dan *civil society organization*) yang ada dalam komunitas tersebut tetapi yang lebih penting adalah karena adanya konsep keterwakilan dalam masyarakat yang di dalamnya mencakup sistem yang representatif.

Pilkada dengan partisipasi langsung masyarakat merupakan bentuk yang terbaik untuk menghasilkan demokrasi yang kita angankan. Secara politik, banyak harapan masyarakat itu terkadang tidak selalu realitis, mengingat bahwa sistem politik, ekonomi, dan birokrasi kita tidak memungkinkan untuk memenuhi semuanya. Karena sistem kita sudah terlanjur rusak dan membutuhkan waktu lama untuk merombaknya menjadi efektif untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Di sinilah sebenarnya, salah satu pekerjaan berat para kepala daerah terpilih untuk menunjukkan bahwa mereka serius memikirkan rakyat.

3. Partisipasi Masyarakat pada Pilkada Langsung

Masyarakat yang berpartisipasi dalam Pilkada ternyata membutuhkan persiapan yang cukup lama, perlu sosialisasi yang intensif dari pemerintah, KPU dan lain-lain pihak, melalui radio, televisi, surat kabar. Masyarakat benar-benar mengingat kapan Pilkada berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya antusias tetapi benar-benar ingin mengaktualisasi hak pilihnya dan melihat sampai sejauh mana pemimpin kepala daerahnya yang dipilihnya itu nantinya membuat kebijakan berdasarkan preferensi kepentingannya atautkah tidak. Partisipasi rakyat dalam Pilkada untuk tujuan pelibatan penuh dalam politik sehari-hari yang sangat mempengaruhi kehidupan mereka di ranah lokal. Selain mengawasi DPRD, rakyat juga dituntut untuk mengontrol kekuasaan kepala daerah pilihan mereka. Menurut salah satu informan yang bekerja sebagai pedagang kaki lima: "tanggal pelaksanaan Pilkada dapat terus dilihat karena terpampang secara jelas di spanduk-spanduk di jalan dan poster-poster yang dipasang." (Wawancara dengan Bu Sukarni, pedagang kaki lima di dekat Universitas Airlangga Surabaya, pada hari Senin, 22 Agustus 2005. Pk. 13.00-selesai di tempat jualan). Selain itu, menurut salah seorang informan yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil bahwa:"

informasi pelaksanaan Pilkada sering disosialisasikan melalui radio, dan media cetak (koran).” (Wawancara dengan Ny. Muryati, pegawai negeri sipil (PNS).

Tabel 3. Alasan ikut kampanye

Kategori	Pilihan	n%
Alasan Ikut Kampanye	1	42,86
	2	0
	3	0
	4	21,43
	5	35,71
	6	0
	7	0
Intensitas	1	100

Sumber: data primer

Keterangan:

- 1 Ingin mengetahui Pilkada karena Pilkada merupakan hal baru
- 2 Ingin mengetahui Pilkada karena Pilkada menampilkan putera terbaik
- 3 Ingin mengetahui Pilkada karena salah satu kontestan adalah kerabat/kenalan
- 4 Ingin mengetahui program-program yang ditawarkan
- 5 Karena ajakan teman/ disuruh orang partai
- 6 Ingin mendapat hiburan dan tambahan pengalaman
- 7 Lain-lain

Dengan demikian, tanggal pelaksanaan Pilkada menjadi mudah diketahui oleh masyarakat. Masyarakat sangat tertarik untuk mengikuti berita-berita Pilkada yang ada di media massa. Dari penelitian ini didapatkan bahwa yang dilakukan masyarakat dalam Pilkada Langsung di Surabaya dari 40 responden penelitian ini, terbanyak yaitu membaca, menonton, mendengar, dan melihat berita-berita Pilkada melalui media massa (80%), dan yang paling sedikit dilakukan adalah ikut serta sebagai tim sukses (7,5%).

Mereka sangat tertarik mengikuti berita-berita Pilkada melalui media massa dengan alasan karena Pilkada merupakan hal baru (40,63%) dan ingin mengetahui program-program yang ditawarkan oleh calon walikota-wakil walikota kontestan Pilkada (40,63%). Sumber informasi yang digunakan terbanyak adalah TV (100%).

Tabel 4. Alasan Mengikuti Berita-berita tentang Pilkada

Kategori	Pilihan	n%
Alasan Mengikuti Berita-Berita Pilkada	1	40,63
	2	3,125
	3	0
	4	40,63
	5	15,63

Sumber: data primer

Keterangan:

- 1 Ingin tahu karena Pilkada merupakan hal baru
- 2 Ingin tahu karena Pilkada merupakan hal baru
- 3 Ingin tahu karena Pilkada merupakan hal baru
- 4 Ingin mengetahui program-program yang ditawarkan
- 5 responden memilih lebih dari satu option

Partisipasi masyarakat juga bisa dilihat dari keikutsertaannya menjadi anggota tim sukses. Terlepas dari analisis untuk kebutuhan praktis kekuasaan material maupun non material, tetapi dalam penelitian ini terungkap bahwa masyarakat sangat besar keikutsertaannya dalam tim sukses. Alasannya mereka tertarik menjadi tim sukses karena mendapat kepuasan moral dan material (66,67%), dan diajak oleh teman/orang partai/kontestan (33,33%).

Selain mengikuti berita-berita Pilkada, sebanyak 35% responden juga pernah ikut/datang ke kampanye. Bentuk kampanye yang paling diminati adalah pemberian layanan sosial misalnya bantuan Sembako, buku, pakaian, dsb (64,29%), bentuk kampanye seperti debat publik, orasi, konvoi, monolog di TV/Radio/Lapangan tidak

disukai oleh masyarakat (0%). Intensitas/tingkat kehadiran masyarakat dalam kampanye hanya sebanyak 1-5 kali (100%).

Mereka tertarik mengikuti kampanye Pilkada karena ingin mengetahui seluk-beluk Pilkada karena Pilkada merupakan hal baru (42,86%), ajakan teman/orang partai (35,71%), dan ingin mengetahui program yang ditawarkan (21,43%). Selain dari media massa, seperti koran, TV, radio, dan internet terdapat media kampanye lain, yaitu melalui kartu/selebaran/brosur. Kartu/selebaran/brosur dikirim oleh kontestan/tim suksesnya kepada masyarakat agar kontestan lebih dikenal dan dipilih oleh masyarakat. Sebanyak 77,5% responden pernah menerima kartu/selebaran/brosur, sedangkan 22,5% tidak pernah mendapatkannya.

Ada data yang menunjukkan bahwa sebagian responden terutama bagi mereka yang pernah menerima kartu/selebaran/brosur itu mengaku senang menerimanya (77,5%). Namun, yang tidak pernah menerimanya mengaku memang tidak ingin/tidak berharap mendapat kartu/selebaran/brosur (77,78%). Mereka yang senang mendapat kartu/selebaran/brosur itu beralasan bahwa mereka menjadi lebih kenal dengan kontestan, sedangkan yang tidak senang/tidak berharap menganggap sebagai suatu hal yang sia-sia dan pemborosan.

Tabel 5. Media kampanye yang digunakan selain Media Massa

Kategori	Pilihan	n%
Pernah/Tidak Menerima Selebaran/brosur	1	77,5
	2	22,5
	-	-

Sumber: data primer

Dilihat dari aspek keikutsertaan masyarakat sebagai pengawas/saksi dalam Pilkada Surabaya menunjukkan angka yang cukup rendah. Hanya sebanyak 2,5% responden yang menjadi saksi/pengawas dalam Pilkada. Mereka yang tertarik menjadi saksi/pengawas karena inisiatif sendiri (100%). Mereka ingin agar Pilkada harus berjalan jujur, adil, dan LUBER. Sedangkan mereka yang tidak ikut sebagai saksi/pengawas sebagian besar beralasan bahwa mereka tidak tertarik/tidak berminat (67,5%).

Tabel 6. Keikutsertaan sebagai Pengawas/saksi dalam Pilkada

Kategori	Pilihan	n%
Ikut serta/ Tidak ikut	1	2,5
	2	97,5

Sumber: data primer

Pengetahuan masyarakat tentang sumber dana pembuatan TPS hanya diketahui oleh sebagian kecil responden (32,50%). Data lengkap lihat Tabel 8.

Tabel 7. Pengetahuan Masyarakat tentang Sumber Dana Pembuatan TPS

Kategori	Sumber Dana	n%
Tahu 32,50%	1	30,77
	2	61,54
	3	0
	4	7,69
Tidak Tahu 67,50%		

Sumber: data primer

Keterangan

- 1 Murni berasal dari anggaran Pilkada dari pemerintah
- 2 Sebagian berasal dari masyarakat
- 3 Murni swadaya masyarakat
- 4 Lain-lain
 - a. berasal dari pemerintah dan kas RT/RW

Tetapi dalam hal lain, masyarakat tampaknya kurang tertarik untuk ikut serta sebagai sukarelawan dalam kegiatan sosial. Meskipun sedikit orang yang mau menjadi sukarelawan dalam kegiatan sosial (15%) namun kegiatan seperti itu dinilai sangat bermanfaat. (85,71%). Menurut salah satu informan yang bekerja sebagai pegawai

swasta: “kegiatan seperti pemberian semprotan demam berdarah gratis, dan pemberian layanan kesehatan seperti pemeriksaan kesehatan secara gratis dinilai menguntungkan masyarakat dan bermanfaat.” (wawancara dengan Emmy Sumintarsih, pegawai swasta/guru) Masih menurut informan yang sama, kegiatan seperti itu harus dilanjutkan dan tidak berhenti hanya sebatas jika ada momentum Pilkada. Ternyata, masyarakat juga tidak terlalu mengetahui sumber dana yang dipakai untuk pembuatan TPS di daerah sekitar tempat tinggalnya (67,5%). Mereka yang tahu (32,5%) menyatakan bahwa dana pembuatan TPS di sekitar rumahnya sebagian berasal dari sumbangan masyarakat (61,54%) namun hanya 23,07% yang ikut memberi sumbangan berupa uang untuk pembuatan TPS.

Tabel 8. Penggunaan hak Pilih dalam Pilkada

Kategori	Pilihan	n%
Digunakan/Tidak	1	87,5
	2	2,5
	3	10

Sumber: data primer

Mengenai penggunaan hak pilih dalam Pilkada langsung di kota Surabaya, calon pemilih yang mempunyai kartu pemilih dapat mempergunakan hak pilihnya. Sebanyak 87,5% responden menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Langsung di Surabaya, sedangkan 2,5% responden tidak menggunakan hak pilihnya. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada umumnya beralasan bahwa dirinya harus menggunakan hak pilihnya sebagai wujud partisipasi dan agar calon yang mereka harapkan bisa memenangkan Pilkada. Sedangkan calon pemilih yang tidak mempunyai kartu pemilih tidak dapat mempergunakan hak pilihnya. Namun, 100% responden yang tidak mempunyai kartu pemilih segera melapor ke RT/RW, kelurahan, atau petugas pendaftaran dan mengikuti semua prosedur agar bisa terdaftar sebagai pemilih sehingga mereka akhirnya mendapat hak untuk memilih. Hal ini karena kartu pemilih merupakan syarat dalam Pilkada Langsung Surabaya. Meskipun demikian ternyata masih ada masyarakat yang tidak memiliki kartu pemilih. Ini terlihat dari 40 responden penelitian ini, ternyata masih ada 10

% yang tidak mendapat kartu pemilih sampai dengan tanggal pelaksanaan pemungutan suara Pilkada.

Tidak semua anggota masyarakat yang memiliki hak memilih menggunakan hak pilihnya sebagaimana mestinya. Ada sebagian dari responden yang tidak menggunakan hak pilih itu dengan alasan yang beragam, karena tidak mendapatkan kartu pemilih dan memang ingin Golput.

Alasan masyarakat menjagokan calon tertentu tidak terlepas dari penilaian yang sudah mereka lakukan sebelumnya tentang calon-calon yang menjadi peserta kompetisi Pilkada ini. Untuk melakukan penilaian itu, masyarakat menggunakan media tertentu, media yang digunakan sebagian besar masyarakat adalah media massa 87,5%, teman (sekolah/teman kerja dan tetangga) 37,5%, Keluarga/kerabat 27,5%, karena dekat dengan orang Partai//Tim sukses 17,5%, tidak ada yang kenal langsung dengan keluarga Cawali/Cawawali, dan melalui kampanye 30% , lewat pertemuan khusus dengan calon (kontrak politik) 2,5%, dan kenal sendiri 2,5%. Selanjutnya untuk mengetahui mediabisa dilihat dari Tabel 10.

Keyakinan masyarakat tentang calon yang dianggap bakal memenangkan kompetisi Pilkada adalah pasangan Bambang DH dan Arief Afandi. Pada sebelum pemungutan suara, dan hasil perhitungan suara diumumkan dan disahkan oleh KPU Daerah, pasangan calon walikota-wakil walikota Bambang DH-Arief Affandi (77,5%) diunggulkan memenangkan Pilkada, sedangkan pasangan Gatot Sudjito-Benyamin Hilly (2,5%) tidak terlalu diunggulkan oleh masyarakat. Masyarakat pada umumnya mengunggulkan pasangan calon Bambang DH-Arief Affandi disebabkan oleh calon tersebut pernah menjabat di eksekutif dan legislatif. Pengalaman dari Bambang DH sebagai walikota Surabaya membuat masyarakat Surabaya percaya dan yakin akan kepemimpinan Bambang DH sehingga masyarakat Surabaya menganggap pasangan calon tersebut pantas untuk memimpin Surabaya. Sebanyak 27 (67,5%) responden menyatakan Bambang DH berhasil memimpin kota Surabaya karena dinilai Surabaya menjadi baik.

Tabel 9. Alasan Menjagokan Pasangan Calon

Kategori	Alasan	n%
Alasan menjagokan pasangan calon tertentu	1	5
	2	0
	3	2,5
	4	37,5
	5	0
	6	5
	7	2,5
	8	22,5
	9	0
	10	22,5

Sumber: data primer

Keterangan:

- 1 calon berpendidikan tinggi dan pintar
- 2 karena calon keturunan priyayi/tokoh agama/tokoh adat
- 3 calon merupakan pengusaha sukses dan kaya
- 4 calon sudah berpengalaman/pernah menjabat di eksekutif atau legislatif
- 5 ajakan keluarga pemilih
- 6 calon diusulkan oleh parpol yang dipilih dalam pemilu Legislatif 2004
- 7 calon memiliki kharisma, wibawa, cakep/ganteng, dan gagah
- 8 suka pada program-programnya
- 9 calon merupakan putera daerah
- 10 lain-lain (tidak ada jago, tidak ada pilihan)

4. Derajat Otonomi Pemilih dalam Pilkada Langsung di Surabaya

Kualitas partai politik yang menjadi kendaraan politik dari kontestan mempengaruhi pilihan masyarakat dalam Pilkada. Masyarakat menganggap bahwa kualitas partai politik yang mengusulkan pasangan calon harus dijadikan bahan

pertimbangan memilih karena selalu ada kesepakatan-kesepakatan antara partai politik dan calon yang diusulkan tersebut. Sebanyak 52,5% responden penelitian ini berpendapat demikian.

Tabel 10. Pengaruh Penilaian terhadap Pilihan dalam Pilkada

Kategori	Pilihan	n%
Terhadap diri sendiri	1	80
	2	20

Sumber: data primer

Penilaian atas calon tertentu yang dilakukan oleh masyarakat ternyata disebarluaskan kepada yang lainnya. Ini merupakan temuan data yang sangat menarik, karena masyarakat melakukan mobilisasi kepada anggota masyarakat lainnya. Dengan kenyataan seperti ini maka sebenarnya pilihan yang dilakukan karena mobilisasi pihak lain adalah bukan partisipasi yang otonom atau yang dibuat berdasar preferensinya sendiri. Selengkapnya lihat data berikut.

Tabel 11. Penyebarluasan Penilaian

Kategori	Kepada siapa	n%
Disebarluaskan 20%	1	87,5
	2	12,5
	3	0
	4	0

Sumber: data primer

Keterangan :

- 1 Kerabat/keluarga
- 2 Teman
- 3 Tetangga
- 4 Lain-lain

5. Rasionalitas Pemilih dalam Pilkada Langsung di Surabaya.

Ada data lain yang menunjukkan bagaimana rasionalitas measih memiliki tempat dalam menentukan pilihan dari masyarakat. Memang masyarakat memiliki penilaian terhadap pasangan calon peserta/kontestan Pilkada Langsung Surabaya dan penilaian ini mempengaruhi pilihan mereka dalam Pilkada (80%). Sebanyak 80% responden menyatakan penilaian ini dipakai sendiri untuk bahan pertimbangan dalam memilih, dan 20% responden menyatakan menyebarluaskan kepada orang lain. Penilaian ini pada umumnya disebarluaskan kepada kerabat/keluarga (87,5%), lihat Tabel 13 dan 14. Berikut ini adalah pendapat dari 40 responden terhadap pasangan calon yang menjadi kontestan Pilkada langsung di Surabaya, yaitu:

- ❖ Pasangan Erlangga-Thony dinilai memiliki penampilan yang menarik, ganteng, terlihat berwibawa, kaya, dan berpendidikan tinggi (15%), terkenal bersih, jujur, tidak melakukan KKN (10%), mampu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik (10%), merupakan putera terbaik daerah (10%), peduli terhadap aspirasi rakyat (7,5%), mempunyai komitmen yang baik, konsisten, dan santun (7,5%), berpengalaman di legislatif (7,5%), dan sederhana, demokratis, dan merakyat (5%).
- ❖ Pasangan Bambang DH-Arief Affandi dinilai berhasil memimpin kota Surabaya karena Surabaya menjadi baik (67,5%), sederhana, demokratis, dan merakyat (55%), peduli terhadap aspirasi rakyat (50%), berpengalaman karena pernah menjabat baik di eksekutif maupun legislatif (47,5%), terkenal bersih, jujur, dan tidak melakukan KKN (42,5%), mempunyai komitmen yang baik, konsisten, dan santun (42,5%), mampu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik (42,5%), merupakan putera terbaik daerah Surabaya (35%), memiliki penampilan menarik, ganteng, terlihat berwibawa, kaya, dan berpendidikan tinggi (27,5%), dan kreatif dan inovatif (27,5%).
- ❖ Pasangan Gatot Sudjito-Benyamin Hilly dinilai sederhana, demokratis, dan merakyat (15%), mempunyai komitmen yang baik, konsisten, dan santun

(10%), berpengalaman di legislatif (10%), terlihat menarik, ganteng, berwibawa, kaya, dan berpendidikan tinggi (7,5%), merupakan putera terbaik daerah Surabaya (7,5%), peduli terhadap aspirasi rakyat (7,5%), terkenal bersih, jujur, dan tidak melakukan KKN (5%), mampu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik (5%), dan kreatif dan inovatif (5%).

- ❖ Pasangan Alisyahbana-Wahyudin dinilai terkenal bersih, jujur, dan tidak melakukan KKN (25%), memiliki penampilan menarik, ganteng, terlihat berwibawa, kaya, dan berpendidikan tinggi (10%), putera terbaik daerah Surabaya (10%), peduli terhadap aspirasi rakyat (10%), berpengalaman di eksekutif dan legislatif (10%), sederhana, demokratis, dan merakyat (7,5%), mempunyai komitmen yang baik, konsisten, dan santun (5%), berhasil memimpin kota Surabaya (2,5%), dan kreatif, dan inovatif (2,5%).

Penilaian dilakukan karena masyarakat mengetahui kualitas calon walikota-wakil walikota. Masyarakat mendapatkan informasi tersebut dari media massa, seperti koran, televisi, radio, dan internet (87,5%), teman (37,5%), kampanye (30%), keluarga/kerabat (27,5%), orang partai/partai/tim sukses (17,5%), pertemuan khusus dengan calon/kontrak politik (2,5%), dan kenal sendiri (2,5%). Informasi yang didapat ini kemudian digunakan untuk menilai kualitas calon yang ada.

Pada Pilkada kali ini, sebagian besar responden (75%) memilih Bambang DH-Arief Affandi dalam Pilkada langsung di Surabaya. Mereka memilih pasangan ini karena menilai pasangan ini sudah berpengalaman, dan berjanji akan meneruskan/melanjutkan program-program yang tertunda. Kepercayaan masyarakat begitu besar karena melihat kepemimpinan Bambang DH pada periode sebelumnya. Selengkapnya lihat tabel berikut.

Tabel 12. Penilaian Masyarakat tentang Kontestan Pilkada

Nama Kontestan	Penilaian	n%
Erlangga-Thony	1	10
	2	0
	3	10
	4	15
	5	10
	6	7,5
	7	5
	8	0
	9	7,5
	10	7,5
	11	0
Bambang DH-Arif A.		
	1	42,5
	2	67,5
	3	40
	4	27,5
	5	35
	6	50
	7	55
	8	27,5
	9	42,5
	10	47,5
11	0	
	1	5
	2	2,5
	3	2,5

Gatot S-Benyamin H	4	7,5
	5	7,5
	6	7,5
	7	15
	8	2,5
	9	10
	10	10
	11	0
Alisyahbana-Wahyudin		
	1	25
	2	2,5
	3	0
	4	10
	5	10
	6	10
	7	7,5
	8	2,5
	9	5
	10	10
11	0	

Sumber: data primer

Tabel 13. Hubungan antara Pengalaman Menjabat dan Perolehan Suara

Kategori	Pilihan	n%
Ada Pengaruh	1	72,5
	2	5
	3	10
Tidak ada pengaruh	1	7,5
	2	2,5
	3	0

Sumber: data primer

Keterangan:

Ada pengaruh:

1. Calon telah dikenal shg kelebihan dan kelemahan
2. Calon mudah melakukan mobilisasi, rekayasa, dsb
3. Sudah terbentuk fanatisme

Tidak ada pengaruh:

1. sudah bisa menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik berdasarkan pertimbangan tertentu (rasional)
2. punya pilihan sendiri yang didasari oleh kedekatan emosional

Memperhatikan tabel di atas, ada hubungan antara pilihan yang dilakukan pemilih dengan latarbelakang calon yang sudah memiliki pengalaman memerintah kota Surabaya. Ini menandakan bahwa pilihan masyarakat dalam Pilkada tidak hanya bisa diartikan otonom dan menunjukkan adanya kesadaran politik yang tinggi tentang siapa yang berhak menjadi pemimpin kepala daerah, melainkan mencerminkan adanya keyakinan rakyat bahwa kepemimpinan dari seorang calon yang sudah berpengalaman memerintah diyakini akan menghasilkan perubahan positif bagi tata pemerintahan kota Surabaya menuju

demokratisasi. Ini adalah faktor obyektif dan positif dari unsur partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi.

6. Tingkat dan Bentuk-Bentuk Primordialisme

Primordialisme dapat berpengaruh pada pilihan politik. Primordialisme dapat berupa (1) kesamaan asal daerah (kesukuan, rasial, dsb), (2) ikatan kekerabatan, (3) ikatan patron-klien (patronisme), (4) kesamaan agama, dan sebagainya.

Tabel 14. Pilihan dalam Pilkada

Kategori	Kepada siapa	n%
Disebarluaskan 20%	1	87,5
	2	12,5
	3	0
	4	0

Sumber: data primer

Keterangan :

- 1 ErlanggaThony
- 2 Bambang DH-Arief Affandi
- 3 Gatot Sudjito-Benyamin Hilly
- 4 Alisyahbana-Wahyudin

Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa sebagian besar responden penelitian ini (97,5%) menyatakan tidak kenal secara dekat calon walikota dan wakil walikota peserta Pilkada Langsung Surabaya. Hanya 2,5% responden yang mengenal secara dekat salah satu kontestan. Responden yang mengenal tersebut mengaku mengenal karena cawali merupakan teman seprofesinya. Mengenal secara dekat karena sama-sama berprofesi sebagai guru/pengajar di kota Surabaya.

Tabel 15. Pasangan yang Memperoleh Suara terbanyak di daerah Pemilih

Kategori	Pilihan	N%
Nama Kontestan	1	0
	2	97,5
	3	2,5
	4	0

Sumber: data primer

Keterangan :

- 1 Erlangga-Thony
- 2 Bambang DH-Arif Affandi
- 3 Gatot Sudjito-Bennyamin Hilly
- 4 Alisyahbana-Wahyudin

Sebagian besar responden penelitian ini (97,5%) juga menyatakan tidak mengenal secara dekat keluarga (orang tua/anak/isteri) kontestan. Hanya 2,5 % responden yang mengaku mengenal secara dekat isteri/anak dari salah satu kontestan. Responden mengenalnya karena satu almamater dengan salah satu keluarga kontestan.

Mayoritas responden penelitian ini (87,5%) menyatakan tidak berasal dari daerah/kampung halaman yang sama dengan kontestan. Hanya 12,5% responden yang berasal dari daerah/kampung halaman yang sama dengan kontestan.

Tabel 16. Asal Daerah yang Sama antar Pemilih dengan Calon

Kategori	Pilihan	n%
Sedaerah/	1	12,5
Tidak	2	87,5

Sumber: data primer

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ada 87,5% responden yang menyatakan bahwa calon yang dipilih mempunyai kesamaan agama dengannya dan hanya 12,5% responden yang tidak mempertimbangkan faktor kesamaan agama. Kecenderungan

lain adalah sebagian responden yaitu 67,5% berpendapat bahwa calon yang dipilih tidak berasal dari organisasi/partai yang sama dengannya. Hanya 27,5% responden yang menyatakan calon yang dipilih berasal dari organisasi/partai yang sama dengannya. Sebagian besar responden (95%) menyatakan bahwa calon yang dipilih bukan/tidak merupakan rekomendasi/rujukan dari tokoh masyarakat/tokoh agama. Mereka memilih tanpa mempertimbangkan rekomendasi dari siapa pun.

Tabel 17. Kedekatan Hubungan antara Kontestan dan Masyarakat

Kategori	Pilihan	n%
Kenal	1	2,5
	2	:
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
Tidak Kenal	10	97,5

Sumber: data primer

Keterangan

- 1 teman sekantor/seprofesi
- 2 teman sewaktu kuliah/sekolah (satu alumni)
- 3 kerabat
- 4 mantan/masih orang dekat
- 5 teman bermain/teman kecil
- 6 setempat tinggal

- 7 tetangga
- 8 mantan/masih atasan/bawahan
- 9 lain-lain
- 10 Tidak kenal

7. Profil Pemimpin Daerah yang Ideal

Figur pemimpin daerah (walikota/wakil walikota) yang paling diharapkan oleh masyarakat adalah mampu memperjuangkan kepentingan pemilih, terutama rakyat/wong cilik. (akomodatif-responsif). Sebanyak 75% responden menyatakan demikian. Sedangkan kesederhanaan tidak terlalu menjadi harapan figur pemimpin daerah yang ideal (2,5%).

Tabel 18. Figur Ideal Kepala Daerah

Kategori	Pilihan	n%
Figur Ideal Kepala Daerah	1	75
	2	45
	3	17,5
	4	25
	5	15
	6	40
	7	22,5
	8	25
	9	2,5

Sumber: data primer

Keterangan:

- 1 Akomodatif-responsif
- 2 transformatif/Revolusioner
- 3 mampu bekerja sama dengan DPRD

- 4 mampu menciptakan ketataprajaan yg baik
- 5 Gagah dan berwibawa
- 6 Bersih, dan bebas KKN
- 7 mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif
- 8 sederhana (good personality)
- 9 Lain-lain
 - o. Jujur

Dari penelitian ini didapatkan bahwa responden yang berpendapat bahwa calon yang dipilihnya (82,5%) menyatakan bahwa calon yang dipilihnya pada Pilkada telah memenuhi kriteria figur ideal kepala daerah dengan alasan (1) calon yang dipilih sudah terbukti kepemimpinannya dari periode yang lalu, (2) memiliki penampilan yang baik, (3) moralitasnya baik, dan (4) peduli wong cilik. Sebagian dari responden (77,5%) menilai bahwa walikota-wakil walikota yang terpilih (pemenang Pilkada Surabaya) sudah memenuhi kriteria figur kepala daerah yang ideal. Mereka beralasan bahwa walikota-wakil walikota yang terpilih (pemenang Pilkada Surabaya) tersebut baik, karena: (1) sudah terbukti dari periode yang lalu, (2) suka pada kepemimpinannya, (3) suka pada personality-nya, dan (4) peduli wong cilik.

Menurut salah satu informan (mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di Surabaya) berpendapat bahwa:” permasalahan kota Surabaya sangat kompleks dan rumit sehingga diperlukan figur yang pas untuk memimpin kota Surabaya.“ Informan tersebut menyatakan bahwa sebenarnya dari sekian kontestan tidak dapat dikatakan sebagai figur ideal namun dinilai cukup baik karena dari semua kontestan (calon walikota/wakil walikota) itu pernah menjabat baik di eksekutif, maupun legislatif, seperti (1) Bambang DH yang menjadi walikota, (2) Alisyahbana yang pernah menjabat sebagai sekretaris daerah, dan (3) A.H Thony, Gatot Sudjito, dan Wahyudin yang merupakan anggota DPRD. Masih menurut informan tersebut, pengalaman para kontestan itu dianggap sebagai modal untuk menjadi pemimpin daerah karena tentunya para kontestan itu telah memahami permasalahan kota Surabaya dan memiliki pemetaan arah pembangunan Kota

Surabaya (wawancara dengan Wahyu Eko P, mahasiswa FISIP Universitas Airlangga Surabaya, pada hari Kamis, 8 September 2005 pk 09.00-selesai di kampus informan).

Pendapat senada diungkapkan oleh informan penelitian ini, wiraswastawan, yaitu figur ideal pemimpin adalah pemimpin yang bisa mengerti penderitaan rakyat dan permasalahan kota Surabaya. Informan ini menambahkan bahwa negara tidak bisa dipakai sebagai ajang ujicoba sehingga pemimpin haruslah orang yang benar-benar mapu dan telah berpengalaman (wawancara dengan Etik Yulastri, tidak bekerja/ibu rumah tangga, pada hari Sabtu, 3 September 2005, pk. 16.00 s.d. selesai di rumah informan) Hal serupa dikemukakan oleh informan/responden kami yang tidak bekerja dan sebagai ibu rumah tangga namun beliau menambahkan pemimpin haruslah berwibawa, disegani, dan penampilannya menarik.

8. Kualitas Demokratisasi di Aras Lokal

Proses Pilkada langsung yang diharapkan menjadi pintu masuk demokratisasi lokal dengan adanya people empowerment sejauh ini pun semakin kentara warnawarninya. Masalah memang tidak berhenti sekalipun peraturan yang mendasarinya terus berganti. Ketika kepala daerah dipilih tidak secara langsung, hanya lewat DPRD sebagai lembaga perwakilan, suara rakyat dianggap terpinggirkan karena pengurus partai politik lewat perpanjangan tangannya di DPRD menjadi kekuatan paling menentukan. Ketika Pilkada langsung, monopoli parpol diharapkan terdabrak, terbuka pintu masuk bagi tokoh lokal, dan juga kemudian isu daerah bisa terangkat.

Pilkada langsung dibebani harapan besar bisa menjadi pintu masuk perubahan lebih besar, menyangkut sistem politik yang lebih demokratis. Namun tetap saja harapan perubahan itu dinilai masih belum sejalan dengan kecenderungan dalam sistem kepartaian Indonesia yang masih sentralistis, justru ketika demokratisasi dan juga desentralisasi butuh lembaga politik yang menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Meskipun ada kelemahan, ada warga politik yang golput, tetapi tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kenduri demokrasi ini cukup tinggi. Ini sebagian

dimungkinkan oleh kesadaran masyarakat kita dan adanya keinginan besar dari masyarakat untuk memiliki pemimpin di daerahnya sesuai dengan keinginannya agar dapat membawa perubahan di daerahnya.

Dalam realitasnya ternyata, masyarakat kita gampang menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan politik yang terus berubah cepat saat ini. Masyarakat tampak sudah mampu belajar sendiri bagaimana tanggung jawab atas tugas kenegaraan, yaitu menggunakan hak pilihnya. Dalam hal ini masyarakat bisa mengevaluasi penyelenggaraan Pilkada. Lihat tabel berikut.

Tabel 19. Penilaian Masyarakat tentang Penyelenggaraan Pilkada

Kategori	Pilihan	n%
Penilaian Masyarakat tentang Pelaksanaan Pilkada	1	0
	2	12,5
	3	80
	4	2,5
	5	5

Sumber: data primer

Keterangan :

- 1 Ya, ada kecurangan dan sudah saya laporkan/saya publikasikan
- 2 Ada kecurangan tapi saya hanya membuat catatan pribadi
- 3 Tidak, tidak ada. Saya menilai Pilkada di Surabaya baik.
- 4 Ada, tapi saya tidak peduli.
- 5 Lain-lain
 - o. Tidak terlalu memperhatikan karena responden tidak tahu/tidak paham tentang politik yang benar.

Kualitas demokrasi di suatu wilayah/daerah/negara salah satunya dapat diukur dari kualitas Pemilu yang diselenggarakan. Dalam dunia politik, pemilihan umum diyakini sebagai cara terbaik untuk memilih pejabat publik. Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan perwujudan dari pasal 24 ayat 5, Undang-Undang Pemerintah Daerah, bahwa "kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah bersangkutan". Artinya, Pilkada sebagai wujud perubahan mendasar proses demokrasi di daerah. Berdasarkan data, dapat dilihat bahwa pelaksanaan Pilkada Langsung di Kota Surabaya, 27 Juni 2005 dinilai cukup baik, karena tidak ditemukan adanya kecurangan. Sebanyak 80% responden penelitian ini menilai Pilkada di Surabaya berlangsung dengan baik dan tidak ada kecurangan. Kualitas lembaga penyelenggara Pilkada juga mempengaruhi kualitas Pilkada. Sebagian besar responden penelitian ini menilai kinerja KPU Daerah sebagai lembaga penyelenggara Pilkada langsung telah cukup baik. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan Pilkada masih banyak kekurangan, yaitu (1) masih banyak calon pemilih yang tidak mendapat kartu pemilih sehingga tidak mempunyai hak pilih dalam Pilkada kemarin, dan (2) moralitas dan netralitas anggota KPU Daerah masih diragukan. Mengenai sebab tinggi/rendahnya jumlah penduduk Surabaya yang tidak terdaftar sebagai pemilih dan banyak yang tidak menggunakan hak pilihnya, Sebagian besar (57,5%) responden penelitian ini menilai penyebab utamanya adalah kesalahan administrasi akibat keteledoran petugas Pantarlih (P4B), mobilitas penduduk yang sangat tinggi, dan masyarakat kurang kooperatif.

Setelah hasil perhitungan suara diumumkan dan disahkan oleh KPU Daerah, sebanyak 82,5% responden menyatakan puas dengan hasil Pilkada tersebut karena: (1) Pilkada dinilai telah berjalan tertib, jujur, adil, dan aman, (2) calon yang didukung terpilih sebagai walikota, (3) penghitungan suara dilakukan secara transparan, (4) Pilkada kemarin menghasilkan pemimpin daerah yang telah berpengalaman memimpin, (5) Walikota-wakil walikota terpilih benar-benar pilihan rakyat, (6) Harapan Surabaya menjadi lebih baik akan terwujud, (7) percaya dengan kinerja KPU Daerah, dan (8) hasil tersebut dinilai sudah proporsional dan objektif. Sedangkan mereka yang tidak puas (17,5%) menilai bahwa (1) Pilkada hanya akal-akalan, (2) calon yang dipilih/didukung

memunculkan pemimpin yang aspiratif, menciptakan stabilitas politik di daerah, serta menghilangkan praktik politik uang. Pilkada saja tidak akan menjamin penguatan demokratisasi lokal manakala penguatan kelembagaan tidak dilakukan serius. Selama reformasi, ada tiga komponen yang tidak tersentuh perubahan: birokrasi, partai politik, dan DPRD. Pilkada langsung tetap saja gagal mendemokratisasi politik lokal ketika institusi seperti DPRD gagal mengembangkan dan memperbarui diri dalam cara kerja khususnya mengakomodasi preferensi-preferensi dan aspirasi politik rakyat dalam bentuk kebijakan publik. Demokratisasi lokal hanya merupakan kulit ketik yang berjalan hanya prosedurnya saja, sementara soal substantif terabaikan.

Praktik-praktik yang terjadi dalam Pilkada secara langsung hanya merupakan gambaran bagaimana desentralisasi masih sulit mewujudkan di Indonesia. Partisipasi masyarakat belum tumbuh sebagaimana mobilisasi yang lebih kerap terjadi. Padahal, Pilkada langsung diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas otonomi daerah. Kebijakan desentralisasi untuk mempercepat demokratisasi lokal hanya sebatas pernyataan saja. Pada kenyataannya, wewenang yang diserahkan kepada pemerintah daerah sangat dibatasi, kontrol pemerintah pusat atas daerah pun sangat ketat, selayaknya yang terjadi pada kebanyakan partai politik saat penjurangan dan penetapan pasangan calon kepala daerah.

Jika merujuk pada ketentuan UU No 5/1974 yang mengedepankan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, status otonomi hanya mengedepankan kewajiban ketimbang hak: daerah berkewajiban dengan penuh tanggung jawab untuk ikut melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Ketika UU No. 22/1999 dilahirkan, upaya untuk menggeser sejarah sentralisasi ke desentralisasi pun belum sepenuhnya terwujud, bahkan dengan UU No.32/2004 meski sudah diselenggarakan Pilkada langsung, tetap saja masih menyisakan agenda demokratisasi, sampai sejauh mana Pilkada menjadi ajang aktualisasi hak-hak politik rakyat untuk mempraktikkan demokrasi, dimana ada proses tawar menawar yang setara antara pemerintah dan rakyat dalam merumuskan kebijakan. Meski juga bisa dikatakan

bahwa partisipasi rakyat yang otonom belum dapat menjadi penjamin pilihan yang baik untuk masa depan demokratisasi lokal.

Dengan masih terlihatnya warna politik dari sikap ambivalensi pemerintah pusat dalam menyelenggarakan otonomi daerah yang berwujud pada "otonomi setengah hati", terutama ketika kewenangan pemerintah daerah tidak terdefiniskan secara spesifik. Nuansa pengaturan relasi pemerintahan pusat dengan daerah pun kembali mencuatkan resentralisasi ketika UU No 32/2004 dibahas dan kemudian disahkan. Undang-undang tersebut memasukkan sejumlah jerat politik untuk mengendalikan pemerintah daerah.

Dengan implementasi konsep desentralisasi administratif kembali menegdepan, tekanan lebih diberikan pada upaya menciptakan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Demokratisasi di tingkat lokal sebagai bagian dari tujuan dasar desentralisasi kembali diposisikan sekadar sebagai agenda tambahan. Kompromi yang dilakukan saat revisi UU Pemerintahan Daerah. Sekalipun materi revisi cenderung kembali ke sentralisasi, nyatanya ada dialog luar biasa yang berujung pada kompromi antara pemerintah daerah dan pusat yang hanya bisa terjadi karena ada persinggungan antara kepentingan ekonomi dan politik jangka pendek. Ketika kewenangan kabupaten/kota dan provinsi dikurangi, tetap saja tidak mencuat resistensi dari daerah karena mengaburnya keinginan membangun daerah dan lebih kuatnya keinginan mendapat proyek yang berpotensi mendatangkan 'keuntungan jangka pendek.

Terdapat dua realitas yang bersebrangan dengan proses politik Pilkada yang sudah terjadi beberapa waktu lalu, dimana di satu sisi ada tuntutan untuk memberdayakan politik rakyat seperti yang dirumuskan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 ternyata UU tersebut sekadar sebagai payung hukum pemilihan secara langsung, karena hampir semua proses Pilkada banyak ditentukan oleh partai politik, seperti dalam pengajuan calon. Partai politik begitu kuat mendominasi proses seleksi calon kepala daerah. Dengan realitas demikian, persoalannya adalah apakah hal ini tidak mengurangi arti demokratisasi di aras lokal. Demokratisasi tidak punya banyak arti jika tidak ada

penguatan partisipasi rakyat dalam realitasnya. Karena bagaimanapun demokratisasi pemilihan kepala daerah memerlukan legitimasi politik yang itu adalah rakyat, tanpa legitimasi yang berfungsi sebagai salah satu arena utama konsolidasi demokrasi, maka tidak ada konsolidasi demokratisasi di aras lokal.

Yang menjadi persoalan sekarang adalah, dengan melaksanakan Pilkada langsung 7-Juni-2005 kemarin, akankah persoalan-persoalan kebangsaan dapat selesai khususnya lagi pada tingkat lokal? Dominasi parpol inilah yang menjadi dilema utama dalam melaksanakan Pilkada langsung 27-Juni-2005. Memang harus kita akui secara normatif, parpol merupakan salah satu arena utama dalam konsolidasi demokrasi modern. Tanpa partai politik demokrasi hanyalah bohong-bohongan. Kita dapat melihat di negara-negara maju, partai politik merupakan kendaraan politik yang paling dominan dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan secara demokratis.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Partisipasi warga kota Surabaya dalam Pilkada langsung menunjukkan adanya otonomi yang besar karena mereka sebagian bisa menentukan pilihan politiknya berdasar preferensi dan aspirasi politiknya. Meski ada juga yang memilih karena sudah dipengaruhi oleh pihak lain, hal ini dilakukan masyarakat sejauh dianggap sesuai dengan preferensi dan aspirasi politiknya.
- b. Peran partai politik dalam mobilisasi warga kurang menunjukkan adanya keterkaitan langsung, kecuali dari tampilan partai dalam memajukan calon yang dianggap memadai. Peluang untuk calon independen dibuka kembali untuk meminimalisasi adanya praktik politik uang. Mobilisasi cenderung datangnya lebih besar dari warga sendiri yang mempengaruhi pihak lain untuk memilih calon yang dianggap layak untuk menjalankan roda tata pemerintahan kota Surabaya.
- c. Unsur primordialisme sedikit banyak berpengaruh tetapi bukan sebagai faktor yang menentukan. Unsur rasionalitas lebih mengedepan untuk menjadi pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihannya. Pola patron client masih terlihat mewarnai pilihan masyarakat dalam Pilkada.
- d. Ada keterkaitan erat antara kualitas partisipasi menentukan kualitas demokratisasi. Dengan adanya kontrak politik dari para calon merupakan bentuk kontrol rakyat terhadap pemimpin dalam menjalankan kekuasaannya. Pemilih yang golput tidak dapat sepenuhnya diartikan sebagai rendahnya daya kritis masyarakat akan demokrasi tetapi bisa diinterpretasi sebagai kekurangan teknis dari penyelenggara Pilkada untuk memberikan kartu pemilih kepada masyarakat yang punya hak pilih.

2. Saran

Menganalisis demokratisasi di aras lokal dengan mengambil pusat analisis pada peristiwa Pilkada masih jauh dari gambaran lengkap, karena itu perlu diteliti lebih dalam lagi aspek-aspek dalam Pilkada, tidak hanya menggunakan perspektif tunggal, tetapi secara multidisiplin mengingat banyak aspek sosial ekonomi politik yang belum dapat ditelaah dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Holland J and Blackburn J (eds.), 1998, *Whose Voice: Participatory Research and Policy Change*, London IT Pub.

Huntington, Samuel P dan Joan Nelson, 1990, *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*, Jakarta, Roneka Cipta.

Jackson, Karl dan Lucian W.Pye, 1978, *Political Power and Communication in Indonesia*, Berkeley, Univ. of California Press.

Liddle, R. Wiliam, 1992. *Partisipasi dan Partai Politik, Indonesia pada Awal Orde Baru*, Grafiti, Jakarta.

Miles, Matthew B dan Michael A. Huberman, 1992., *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta-UI Press.

Richardson, R, 1996, *Participation*, London, Routledge and Keegan.

UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Surat Kabar:

Surabaya Post, Kompas.

KPU Surabaya Bantah Pengelembungan Pemilih Pilkada, Kantor Berita Antara (Antara News), Apr 28 10:06